

## Naskah Akademik

Program Penyiapan Pelaku Usaha Level Mikro untuk Diikutsertakan dalam Program Kartu Prakerja dan Bantuan Langsung Post Covid 19

### Daftar Isi

### Contents

Daftar Isi .....	5
BAGIAN 1 Sekilas tentang Kartu Prakerja .....	7
1.1. Dasar peraturan .....	7
1.2. Detail Program .....	7
1.3. Besaran APBN pada Kartu Prakerja.....	11
1.4. Pelaksana .....	12
1.5. Pandangan UMKM Terhadap Kartu Prakerja di Masa Pandemi.....	15
1.6. POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Kartu Prakerja .....	15
1.7. Kartu Prakerja bagi UMKM .....	16
BAGIAN 2 Pro Kontra terkait Kartu Prakerja .....	18
BAGIAN 3 Benchmark program kartu prakerja di negara lain.....	20
3.1. Inggris.....	20
3.2. Irlandia .....	26
3.3. Kanada.....	29
3.4. Estonia.....	32
3.5. Finlandia.....	35
3.6. Kroasia.....	37
3.7. Yunani.....	39
3.8. Singapura.....	42
BAGIAN 4 Perbandingan program kartu prakerja dengan benchmark negara lain .....	45
BAGIAN 5 Pelaksanaan dan Evaluasi Kartu Prakerja.....	52
5.1. Analisis <i>Strength Weakness Opportunity Threat</i> (SWOT) Kartu Prakerja Bagi UMKM .....	52
5.2. Database Kartu Prakerja .....	52
5.3. Sebaran Geografis Kartu Prakerja.....	53
5.4. Ketepatsasaran Penerima Kartu Prakerja .....	53
5.5. Modifikasi Pelaksanaan di masa Pandemi Covid 19.....	54
5.6. Koordinasi Pelaksanaan .....	55
5.7. <i>Key Performance Indicator</i> Kartu Prakerja.....	57
BAGIAN 6 Rekomendasi Pelaksanaan Kartu Prakerja Bagi UMKM .....	59
Daftar Pustaka .....	60



## BAGIAN 1 Sekilas tentang Kartu Prakerja

### 1.1. Dasar peraturan

Ditetapkan tanggal 26 Februari 2020, pada awalnya dasar peraturan dari Program Kartu Prakerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Namun pada tanggal 7 Juli 2020, ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Selain itu, terdapat dua aturan pelaksanaan dari Program Kartu Prakerja, yaitu: PMK No. 25 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja; serta Permenko No. 11 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.

Dasar penyusunan Kebijakan Kartu Prakerja adalah penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan saat ini dan di masa mendatang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tantangan transformasi struktural perekonomian atau saat ini sering disebut Industri 4.0, dimana pengaruhnya sangat besar dalam pengalihan investasi dari padat karya ke padat modal (padat teknologi).

Industri 4.0 merupakan peluang besar bagi Industri untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun disisi lain akan memberikan dampak struktural kepada tenaga kerja dimana banyak lapangan pekerjaan yang akan hilang. Hal ini merupakan tantangan besar mengingat Indonesia saat ini tenaga kerja Indonesia di dominasi oleh lulusan SMP ke bawah ditambah dengan *mismatch* angkatan kerja yang cukup tinggi.

Disatu sisi, Indonesia memiliki keunggulan dimana diproyeksikan pada tahun 2030-2040 Indonesia menghadapi bonus demografi dimana 70% dari total penduduk berusia produktif. Tantangan dan keunggulan tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi beban terhadap perekonomian. Perkembangan kompetensi kerja yang sangat cepat saat ini belum diimbangi oleh kualitas sistem pendidikan formal dan pelatihan nasional, solusi jangka pendek adalah memberikan pelatihan singkat yang fokus pada peningkatan kompetensi. Program Kartu Prakerja merupakan salah satu instrumen peningkatan keterampilan untuk mengejar kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan masa mendatang.

### 1.2. Detail Program

Program Kartu Prakerja pertama kali disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat kampanye "Optimis Indonesia Maju" di Sentul tanggal 24 Februari 2020. Konsep Kartu Pra-Kerja yang disampaikan adalah bantuan layanan pelatihan vokasi baik skilling, reskilling, dan upskilling, untuk yang belum bekerja, sedang bekerja, dan yang akan berganti pekerjaan. Diharapkan dengan program ini meningkatkan keterampilan sehingga Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas premium yang mampu bersaing di dalam dan luar negeri.

Angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sementara pekerja yang memiliki skill jumlahnya terbatas. Demikian halnya dengan penyebaran para pekerja yang memiliki skill. Penyebaran pekerja yang memiliki keterampilan di daerah pelosok dari segi jumlah akan jauh lebih kurang (skill worker) dibanding daerah yang lebih dekat perkotaan. Selain itu produktivitas dan daya saing SDM Indonesia yang rendah, merupakan salah satu penyebab investor asing kurang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan Pemerintah terkait pengembangan kapasitas SDM yang *Not Business As Usual*, utamanya dalam menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM di era industri 4.0 dan ekonomi digital.

Sejak kampanye terus dilakukan pembahasan dalam tim beranggotakan TNP2K, Kemnaker, Kemenko perekonomian, KSP, dan Setwapres. Dalam perjalanannya, desain Kartu Prakerja terus mengalami penyempurnaan menyesuaikan dengan arahan Presiden dan masukan dari berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, akademisi, peneliti, lembaga internasional, HRD Perusahaan, Platform Digital, dan lembaga pelatihan.

Pada akhirnya desain final program yang akan dituangkan dalam Perpres disepakati tanggal 27 Desember 2019. Perpres Kartu disahkan pada tanggal 26 Februari 2020, mengingat Perpres Kartu Prakerja pengaturannya bersifat umum untuk itu, diperlukan peraturan turunan. Peraturan turunan kartu prakerja adalah PMK No. 25 Tahun 2020 dan Permenko No. 3 Tahun 2020 yang masing-masing disahkan pada 24 dan 27 Maret 2020, hingga dibentuknya Manajemen Pelaksana dan launching pendaftaran dibuka pada tanggal 11 April 2020.

Program ini ditargetkan untuk jangka Panjang karena targetnya adalah skilling, reskilling, dan upskilling, sebagai bisnis proses baru pengembangan SDM di Indonesia. Tentunya target kedepan akan menyesuaikan seiring dengan membaiknya kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan situs daring [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id), Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini menysasar 5,6 juta orang peserta pada tahun 2020 ini, dengan total anggaran program sebesar Rp20 Triliun di tahun 2020. Kartu Prakerja bukanlah kartu fisik melainkan 6 digit kode unik seperti kartu kredit, yang berisikan saldo bantuan biaya pelatihan yang dapat digunakan oleh penerima kartu prakerja untuk membeli program pelatihan yang mereka butuhkan.

Semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal dapat mendaftar Program Kartu Prakerja. Untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui *marketplace* dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Dengan menggandeng pelaku usaha swasta, Program Kartu Prakerja adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul dan Indonesia maju.

Berdasarkan situs daring [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id), Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada: 1) Pejabat Negara; 2) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3) Aparatur Sipil

Negara; 4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia; 5) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6) Kepala Desa dan perangkat desa; dan 7) Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Untuk mendapatkan dana Program Kartu Prakerja, pelamar perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Terdapat dua cara mendaftar Program Kartu Prakerja, yakni secara luring dan daring. Berdasarkan Pasal 10 Perpres No. 76 tahun 2020, proses pendaftaran luring dapat dilakukan melalui Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah (khususnya Dinas Ketenagakerjaan) pada keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut adalah karena terbatasnya infrastruktur telekomunikasi dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pelamar yang mendaftar secara luring dapat datang ke instansi terkait secara langsung untuk mengisi formulir lamaran Program yang isinya sama dengan formulir jika pelamar mengajukan lamaran secara daring. Pada proses daring, pelamar harus melalui beberapa tahapan pendaftaran. Berikut adalah tahapan pendaftaran secara daring dari Program Kartu Prakerja.

- a. Pelamar melakukan pendaftaran akun Kartu Prakerja di situs [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id).
- b. Pelamar melakukan verifikasi akun di alamat *email* yang didaftarkan oleh pelamar.
- c. Setelah melakukan verifikasi akun, pelamar melakukan login dengan menggunakan email yang didaftarkan oleh pelamar.
- d. Pelamar mengisi data KTP, NIK, nomor KK, dan tanggal lahir sesuai yang tertera di KTP untuk keperluan verifikasi data.
- e. Pelamar melengkapi data diri yang diminta dan mengunggah foto KTP.
- f. Pelamar melakukan verifikasi nomor *handphone*.
- g. Setelah nomor *handphone* terverifikasi, pelamar mengisi pernyataan pendaftar.
- h. Pelamar melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar.
- i. Setelah melakukan tes, pendaftar memilih gelombang seleksi.
- j. Pelamar menyetujui persetujuan Prakerja
- k. Proses pendaftaran selesai. Pelamar akan mendapatkan notifikasi apakah pelamar lolos seleksi Program Kartu Prakerja melalui SMS setelah penutupan gelombang.

Penerima Kartu Prakerja dapat mengakses program pelatihan yang dibutuhkan pada mitra *platform* digital yang digandeng dalam Program Kartu Prakerja. Saat ini, mitra *platform* digital tersebut yaitu: Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Berdasarkan situs daring [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id), Kartu Prakerja tidak membatasi jumlah lembaga pelatihan yang ikut dalam program. Berikut adalah kriteria dari badan usaha agar dapat menjadi mitra pelatihan Prakerja:

- a. Memiliki kerja sama dengan mitra *platform* digital resmi Kartu Prakerja;
- b. Memiliki sistem tata kelola yang mendukung program Kartu Prakerja;
- c. Menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- d. Memiliki kurikulum yang terstruktur;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. Menyediakan tenaga pendidik dengan kualifikasi yang relevan; dan
- g. Memiliki sistem evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020, dilakukan *refocusing* program

Besaran anggaran program dalam APBN ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan anggaran Kartu Prakerja sebanyak Rp10.3 Triliun, yang dalam desain awal terbagi menjadi 2 Skema dengan rincian komponen yaitu:

(i) Skema Digital (1 Juta Penerima @Rp2.650.000)

- a. Biaya Pelatihan Rp2.000.000
- b. Insentif Pasca Pelatihan Rp500.000
- c. Insentif Pengisian Survei Rp150.000

(ii) Skema Reguler (1 Juta Penerima @Rp7.650.000)

- a. Biaya Pelatihan Rp6.100.000
- b. Sertifikasi Kompetensi Rp900.000
- c. Insentif Pasca Pelatihan Rp500.000
- d. Insentif Pengisian Survei Rp150.000

Dalam perkembangannya terkait alokasi anggaran ini sangat dinamis, sehingga pengajuannya total anggaran Kartu Prakerja yang disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk dianggarkan dalam Pagu Indikatif APBN 2020 adalah sebesar Rp10 Triliun. Kemudian dengan situasi perkembangan pandemic Covid-19, Bapak Presiden memutuskan program kartu prakerja sebagai bagian tambahan program social safety net. Dengan kebijakan ini alokasi anggaran ditingkatkan menjadi Rp20 Triliun.

Dana bantuan ini akan disalurkan kepada Penerima Program secara non-tunai, dengan cara ditransfer ke rekening bank atau akun e-wallet telah didaftarkan oleh pelamar. Sejauh ini, mitra pembayaran Program Kartu Prakerja adalah Bank BNI, OVO, LinkAja, Gopay, dan DANA (perjanjian kemitraan dibuat Agustus 2020). Sebelum menyambungkan rekening bank atau e-wallet dengan akun Kartu Prakerja, pelamar perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Nomor rekening bank dan *e-wallet/e-money* adalah atas nama pribadi (menggunakan NIK yang sama dengan NIK yang terdaftar di Kartu Prakerja) ;
- b. Jika memilih *e-wallet*, pelamar harus memastikan telah mempunyai akun e-wallet di salah satu mitra pembayaran *e-wallet* Kartu Prakerja (OVO, LinkAja, Gopay) dan DANA (jika sudah tersedia).
- c. Pelamar harus memastikan nomor HP yang terdaftar di Kartu Prakerja merupakan nomor telepon akun *e-wallet/e-money*;
- d. Pelamar harus memastikan akun *e-wallet* sudah di-upgrade atau akun *e-wallet* KYC (verifikasi KTP & swafoto).

Untuk mendapatkan insentif pelatihan, penerima Program harus memenuhi beberapa hal. Insentif pelatihan akan didapatkan jika pelamar memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan Pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat
- b. Dalam hal penerima Kartu Prakerja mengikuti lebih dari satu pelatihan, Insentif Pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama. Tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya.
- c. Telah memberikan ulasan terhadap Lembaga Pelatihan

- d. Telah memberikan penilaian kepada Lembaga Pelatihan
- e. Telah berhasil menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun situs [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id)
- f. Nomor rekening bank atau *e-wallet* yang didaftarkan telah tervalidasi (menggunakan NIK yang sama dengan NIK terdaftar di Kartu Prakerja dan sudah KYC atau akun e-money sudah *premium/upgrade*) oleh bank/perusahaan e-money terkait.

Penyaluran insentif akan dilakukan maksimum 7 (tujuh) Hari Kerja setelah semua persyaratan di atas terpenuhi. Selain itu, untuk mendapatkan insentif survey, penerima Kartu Prakerja harus mengisi survey di akun [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id) untuk mengetahui evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja. Insentif yang diberikan ini dapat digunakan untuk meringankan biaya yang sudah dikeluarkan oleh penerima Program selama masa pelatihan, seperti biaya konsumsi, transportasi, dan komunikasi. Insentif ini juga dapat digunakan untuk meringankan biaya selama mencari pekerjaan.

Kartu Pra-Kerja merupakan program pelatihan vokasi untuk lulusan SMA/ sederajat, pencari kerja, korban PHK, maupun pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. Survey menunjukkan pelaku usaha mikro dan kecil serta pekerja sektor informal (yang tidak memiliki kontrak tertulis ataupun tidak memiliki kontrak sama sekali) juga menjadi penerima Kartu Prakerja. Kebijakan Kartu Prakerja disusun oleh Komite Cipta Kerja, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Operasi sehari-harinya dilaksanakan oleh PMO.

Kartu Prakerja menggunakan metode pendaftaran secara aktif oleh calon peserta sendiri (*self-targeting, on-demand*) baik secara *online* maupun *offline*. Pendaftaran secara *offline* baru dibuka dalam Perpres 76/2020 dalam hal infrastruktur telekomunikasi terbatas dan ada kebijakan pemerintah Pusat. Pendaftaran secara *offline* dilakukan oleh K/L dan Pemda, dikoordinir oleh Kemenaker. Sampai saat ini pendaftaran peserta lewat *online*. Tidak ada surat, pertemuan, birokrasi untuk mendaftar kartu pra-kerja. Survey evaluasi kepada penerima Kartu Prakerja dilakukan untuk mengetahui penilaian peserta terhadap pelatihan, perubahan status kerja mereka, dan pola belanja mereka. *Impact analysis* dari kartu pekerja terhadap peserta, mitra, dan employers belum dilakukan. *Impact analysis* akan dilakukan oleh peneliti independen dengan dana masing-masing.

Edukasi dan sosialisasi Program juga dilakukan dengan pemberian informasi melalui *website, social media*, serta terdapat *customer service* dalam bentuk email maupun telpon yang senantiasa menjawab komplain ataupun pertanyaan pemangku kepentingan.

### 1.3. Besaran APBN pada Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam RPJMN 2020 - 2024. Dengan demikian program ini akan diberikan setiap tahunnya kepada masyarakat utamanya pencari kerja. Total dana Program Kartu Prakerja yang dianggarkan dalam APBN 2020 sebesar Rp 10 Triliun. Anggaran tersebut ditargetkan untuk menysasar 2 juta penerima selama tahun 2020. Target 2 juta penerima tersebut akan didistribusikan ke masing-masing provinsi berdasarkan tingkat pengangguran yang ada disetiap provinsi.

Dengan adanya wabah COVID-19, berdasarkan arahan Presiden, anggaran Program Kartu Prakerja ditingkatkan menjadi Rp 20 Triliun dengan target penerima mencapai 5,6 Juta.

Penambahan anggaran tersebut merupakan upaya untuk menjadikan Kartu Prakerja sebagai salah satu social safety net yang digunakan untuk mengatasi dampak akibat adanya COVID-19.

Program kartu prakerja dilakukan mulai tahun 2020 dan akan dijalankan setiap tahun hingga lima tahun kedepan dengan target dan besaran pembiayaan akan dievaluasi dan disesuaikan lebih lanjut oleh Komite Cipta Kerja. Mekanisme penyertaan dana Pemda masih disusun oleh Manajemen Pelaksana (juknis). Fokus utama yang dilakukan saat ini adalah menjamin penyaluran Program Kartu Prakerja agar dapat berjalan dengan lancar, merata dan tepat sasaran. Selain itu secara parallel kebutuhan lainnya juga ikut dipenuhi untuk memastikan tata kelola program yang baik.

#### 1.4. Pelaksana

Secara umum stakeholder Kartu Prakerja adalah (i) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, (iii) lembaga pelatihan, (iv) platform digital, dan (v) perusahaan. Kementerian yang memiliki peran utama dalam program adalah kementerian dalam Komite Cipta Kerja yaitu: (i) Kemenko Perekonomian, (ii) Kantor Staf Presiden, (iii) Kemnaker, (iv) Kemenkeu, (v) KemenPPN/Bappenas, (vi) Kemendikbud, (vii) Kemenperin, dan (viii) Kemendagri. Secara umum peran kementerian tersebut adalah melaksanakan program dari sisi perencanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan anggaran, dan mendorong pihak eksternal seperti Pemerintah Daerah, Lembaga Pelatihan, dan industri.

Dalam penyusunan aturan kebijakan juga melibatkan K/L terkait lainnya seperti LKPP, BPKP termasuk Lembaga pelatihan dan platform digital, agar dihasilkan sebuah desain program yang mendorong keterlibatan Pemerintah dan swasta. Pelibatan swasta juga ditujukan agar program dapat lebih massif dan dapat dilakukan skala nasional.

Terkait peran dari stakeholder lainnya, Lembaga pelatihan memiliki peran menyediakan pelatihan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Lembaga pelatihan kemudian bergabung kedalam marketplace yang diciptakan oleh Platform Digital, dengan adanya marketplace ini diharapkan mengurangi *asymetric information* dan menciptakan kompetensi sehingga market menjadi efisien.

Untuk peran Perusahaan sendiri, dalam tahap awal implementasi saat ini belum terlihat perannya karena ekosistem kartu Prakerja belum terbangun sempurna. Peran dari Perusahaan adalah menyediakan informasi mengenai kebutuhan jumlah tenaga kerja dan kompetensi yang dibutuhkan supaya marketplace dalam ekosistem kartu Prakerja adalah marketplace yang *industry driven*.

Berdasarkan Perpres No. 76 tahun 2020, penyelenggaraan Program Kartu Prakerja dilakukan oleh Komite Cipta Kerja dengan dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana. Tabel berikut menunjukkan susunan organisasi dari Komite Cipta Kerja:

Tabel 1. Susunan Organisasi Komite Cipta Kerja

Jabatan	Pihak
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua	Kepala Staf Kepresidenan
Anggota	1. Menteri Sekretaris Negara
	2. Menteri Dalam Negeri
	3. Menteri Keuangan
	4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
	5. Menteri Ketenagakerjaan
	6. Menteri Perindustrian
	7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	8. Sekretaris Kabinet
	9. Jaksa Agung
	10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
	11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sekretaris	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sumber : Perpres No. 76 tahun 2020

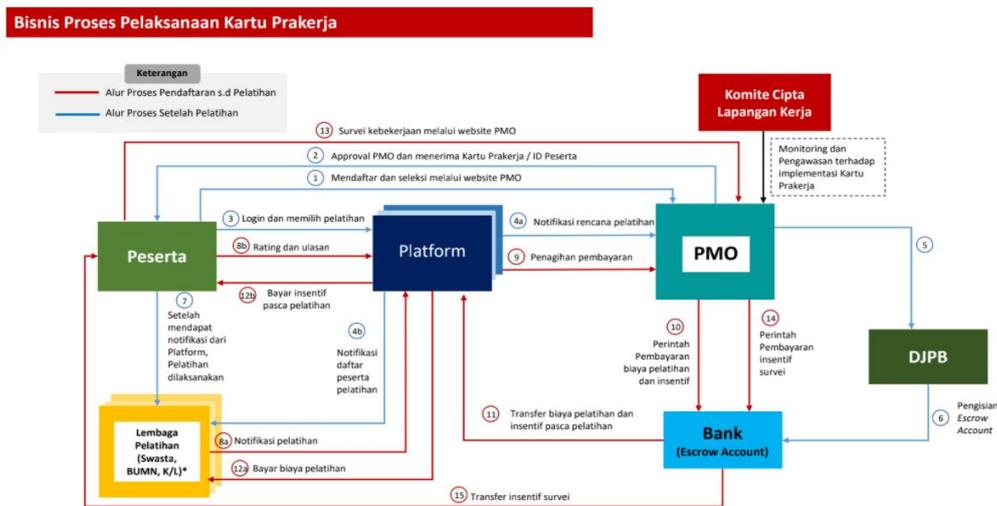
Komite Cipta Kerja dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana dalam penyelenggaraan Program Kartu Pra Kerja. Tim Pelaksana terdiri dari pejabat kementerian/lembaga yang ditetapkan oleh Ketua Komite Cipta Kerja. Kemudian, Tim Pelaksana bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas komite dan melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite Cipta Kerja.

Manajemen Pelaksana (*Project Management Office*) adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja dan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang akan melaksanakan operasional Kartu Prakerja. Manajemen Pelaksana terdiri dari satu Direktur Eksekutif dan lima Direktur. Lima Direktur tersebut adalah Direktur Operasi; Direktur Teknologi; Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem; Direktur Pemantauan dan Evaluasi; serta Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan. Berdasarkan Perpres No. 76 tahun 2020, Manajemen Pelaksana mempunyai tugas untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja, di mana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- operasi Program Kartu Prakerja;
- pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;
- komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;
- pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
- penyediaan informasi pasar kerja

Terkait dengan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, berikut adalah ilustrasi dari proses bisnis

Gambar 1. Proses Bisnis Pelaksanaan Program Kartu Prakerja



Sumber : Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019)

Kartu Pra-Kerja dikelola dibawah Kemenkop Perekonomian tepatnya PMO, sedangkan kementerian lainnya, contohnya Kemenkeu hanya bertugas sebagai *governance* saja dan memastikan kesesuaian tujuan program saja. Kementerian Lembaga yang memonitor program ini adalah Kemenaker dan Menko Perekonomian. Tahun ini ditargetkan 5,6 juta orang yang

menerima kartu Pra-Kerja, untuk saat ini dari batch 1-4 sudah tersalurkan sekitar 1,5 juta orang, diharapkan hingga akhir tahun ini sudah mencakup 5,6 juta. Khusus data data, akan ada di masing-masing lembaga, namun nanti bisa digunakan oleh kementerian lainnya. Nanti juga akan ada program Satudata dari Kominfo sehingga seluruh data yang ada di kementerian bisa di akses melalui satu pintu, namun setiap lembaga harus tetap melakukan pembaharuan data dan validasi data. Untuk monitoring dan juga ukuran pencapaian program akan ada evaluasi dampak yang akan dikerjakan oleh tim *researcher*.

### 1.5. Pandangan UMKM Terhadap Kartu Prakerja di Masa Pandemi

Bagi UKM Fashion, di awal pandemic mengalami kesulitan, namun setelah itu mulai berjualan melalui *online*, dan bisa bertahan meskipun tidak seperti sebelumnya. Untuk UKM Kuliner juga awalnya mengalami kesulitan dan tidak mendapatkan pendapatan apapun, setelah itu disiasati dengan berjualan secara online dan akhirnya bisa bertahan meskipun belum normal

Khusus UKM Jasa, awalnya mengalami kesulitan dan tidak mendapatkan apapun, namun setelah new normal mulai membaik meskipun belum normal, namun saat kasus covid meningkat lagi, terjadi penurunan. Para pelaku UMKM merasa program kartu pra-kerja tidak terlalu sesuai diterapkan untuk UMKM di masa pandemic ini, dikarenakan UMKM merasa membutuhkan pendampingan terkait pemasaran dan juga pangsa pasar. Terkecuali pelatihan yang lebih sesuai dan dibutuhkan oleh UMKM (penjualan daring, pemasaran daring) yang tidak bisa didapatkan secara bebas.

Kartu pra-kerja dirasa lebih cocok untuk para pelaku usaha yang lebih muda, untuk yang sudah berumur agak kurang tepat karena agak sulit kalau harus mengikuti pelatihan dan belajar kembali. Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dan penyuluhan usaha agar bisa *survive* di pandemi ini, namun untuk pendampingan *online* agak sulit untuk UMKM, jadi mungkin bisa dalam bentuk kunjunga. Apabila dilakukan pendampingan secara *online*, harus dilakukan sosialisasi dan juga perbaikan signal. Terdapat banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga yang benar-benar membutuhkan bantuan, justru tidak mendapatkan bantuan

Proses pengajuan bantuan masih sangat rumit dan juga terjadi perbedaan informasi dari satu institusi dengan institusi yang lain, sehingga membingungkan bagi para pelaku UMKM yang mau mengajukan bantuan dana maupun mengurus perizinan.

### 1.6. POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Kartu Prakerja

Pada perencanaan kebijakan kartu prakerja, dilibatkan banyak stakeholder yang bertujuan untuk mendapatkan masukan komprehensif mengingat Program Kartu Prakerja adalah program baru yang didesain *not as business as usual* yang diharapkan mendorong perbaikan penyelenggaraan pelatihan nasional. Program kartu prakerja didesain sebagai sebuah ekosistem terbuka dan berkompetisi, sehingga menghasilkan efisiensi pasar yang akan menguntungkan masyarakat.

Desain pelaksana program juga didesain sedemikian rupa agar efisien dari sisi jumlah, semaksimal mungkin menggunakan struktur organisasi dan fungsi yang sudah ada. Dalam hal menciptakan struktur organisasi baru, organisasi tersebut didesain harus beranggotakan profesional pada bidang masing-masing dengan proses rekrutmen terbuka. Desain organisasi juga dirancang memisahkan prinsip-prinsip fungsi *maker*, *checker*, dan *approver*.

Tahapan *actuating* yang sudah dilakukan adalah mulai dari rekrutmen platform, pembangunan sistem informasi prakerja.go.id yang didalamnya terintegrasi berbagai sistem seperti sistem pembayaran dengan kemenkeu dan perbankan, Sistem verifikasi data yang terintegrasi dengan Dukcapil, Dapodik dll. Tahapan *actuating* ini dilakukan oleh Manajemen Pelaksana dengan memperhatikan arahan Komite Cipta Kerja dan monitoring dari Tim Pelaksana.

Pengendalian program Kartu Prakerja dilakukan oleh komite cipta kerja dan tim pelaksana agar pelaksanaan Program Kartu Prakerja sesuai dengan desain yang ditetapkan. Dalam tahap awal pelaksanaan, pengendalian yang sudah dilakukan berupa rapat evaluasi rutin pada saat penutupan Batch Pendaftaran.

Dalam proses *controlling* ini pun masih belum lah sempurna seutuhnya, karena masih dalam tahapan awal pelaksanaan satu *business cycle*. Guna memastikan semua pelaksanaan tidak melanggar aturan, pelaksanaan program Kartu Prakerja didampingi oleh berbagai lembaga pemerintah seperti KPK, Kejaksaan, Bareskrim, KPPU, LKPP, dan BPKP.

### 1.7. Kartu Prakerja bagi UMKM

Dalam situasi pandemik Covid-19, sektor UMKM terkena dampak yang cukup signifikan. Hasil survey pada mitra binaan UKM Center FEB UI menunjukkan hal sebagai berikut:

Tabel 2. Penurunan Omset UMKM

	Rerata penurunan omset
Kuliner	79%
Jasa perawatan	94%
Perdagangan	83%

Sumber: Wawancara Mitra Binaan UKM Center FEB UI

Hasil wawancara pada mitra binaan UKM Center FEB UI menunjukkan bahwa UKM binaan sangat terdampak pada kejadian pandemik Covid-19 ini. Mitra binaan yang sangat berdampak adalah mitra binaan yang bergerak pada sektor jasa perawatan sebesar 94%. Hal ini bisa dipastikan karena pembatasan jarak antar manusia saat ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk membuka usaha dan jika usaha dibuka pun, pelanggan dipastikan sangat berkurang karena instruksi pemerintah untuk pembatasan sosial berskala besar. Sektor perdagangan juga mengalami penurunan sebesar 83% sedangkan kuliner mengalami penurunan sebesar 79%. Hal ini dikarenakan kuliner mulai mengalami *shifting* usaha mereka dengan melayani jasa *delivery* makanan begitu pula jasa perdagangan.

Gambar 2. Prediksi Sektor Perekonomian Sepanjang COVID-19



Sumber: Dcode EFC Analysis

Berdasarkan ilustrasi Dcode EFC Analysis, kedepannya diprediksi bahwa sektor industri yang kemungkinan mengalami kerugian dalam jangka pendek terutama sepanjang periode Covid 19 ini, antara lain: sektor jasa pariwisata, sektor penerbangan dan jasa maritim, otomotif, konstruksi dan real estate, manufacturing, jasa keuangan, edukasi, dan minyak serta gas. Sedangkan, beberapa sektor yang akan mengalami kenaikan permintaan adalah sektor pertanian, e-commerce, ICT, jasa kesehatan, pengolahan makanan serta retail, dan jasa medis. Hal ini sesuai dengan survey indeks kebahagiaan yang dilakukan oleh UKM Center FEB UI bahwa para pelaku usaha memiliki tiga prioritas utama, yaitu keluarga harmonis, keluarga sehat dan keluarga sejahtera. Sehingga beberapa sektor usaha tersier cenderung diabaikan pada kondisi pandemik seperti ini.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, penurunan aktivitas usaha dirasakan oleh hampir seluruh UKM akibat pandemi, dengan dampak yang dirasakan adalah menurunnya permintaan, kendala pemasaran, dan ketersediaan bahan baku. Terkait dengan menurunnya permintaan dan kendala pemasaran, Program Kartu Prakerja dapat menjadi sebuah solusi untuk membantu pelaku UKM di mana peserta dapat mengakses pelatihan untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Kencana (2020) dalam situs daring liputan6.com, Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja menyediakan pelatihan yang memberikan pembekalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Adanya program pelatihan diharapkan membantu pelaku usaha mikro dan kecil, seperti cara menangkap peluang bisnis di pasar digital, cara mengemas produk agar lebih menarik, literasi keuangan, dan berbagai program lainnya.

Berdasarkan situs daring prakerja.go.id, salah satu prioritas penerima Program Kartu Prakerja adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Adanya penambahan satu poin tujuan Program Kartu Prakerja pada Perpres No. 76 tahun 2020 terkait dengan pengembangan kewirausahaan diharapkan dapat menjadi hal yang dapat membantu pelaku usaha kecil dan mikro dalam menjalankan usahanya, khususnya selama masa pandemi ini.

## BAGIAN 2 Pro Kontra terkait Kartu Prakerja

Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja menimbulkan pro kontra yang berkembang di masyarakat. Dalam CNN Indonesia (2020), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebutkan bahwa Program Kartu Prakerja yang merupakan program semi bansos ini membantu korban PHK. Pihak lain yang mendukung menyebutkan bahwa Program Kartu Prakerja ini dapat membantu masyarakat selama pandemik Covid-19 dan meningkatkan keahlian dari tenaga kerja Indonesia. Pihak lainnya juga menyatakan bahwa program Kartu Prakerja patut didukung penyelenggaraannya dengan catatan akurasi pendataan harus ditingkatkan. Sistem harus dapat mendeteksi siapa yang patut diprioritaskan dengan kriteria yang jelas. Dalam artikel yang direportasekan oleh Laoli (2020) di situs daring nasional.kontan.co.id, Program Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong lahirnya kreativitas dan jenis usaha baru pascakrisis akibat keterbatasan kerja di sektor formal selama masa pandemik Covid-19. Kemudian, Program Kartu Prakerja diharapkan mendorong mental mandiri masyarakat dan berperan sebagai *social safety net* yang mampu meredam gejolak ekonomi akibat pandemik Covid-19.

Di satu sisi, penyelenggaraan Program Kartu Prakerja menimbulkan kontra di masyarakat. Dalam situs daring CNN Indonesia (2020), situs daring Detik (2020), dan Idris (2020) dalam situs daring money.kompas.com, beberapa pihak menyatakan kurang setuju dengan penyelenggaraan Program Kartu Prakerja. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pihak tersebut tidak setuju:

- Anggaran sebesar Rp5,6 Triliun yang dikeluarkan untuk biaya pelatihan daring tidak masuk akal dikarenakan hanya untuk membeli video tutorial.
- Program Kartu Prakerja masih perlu dicermati kembali apakah relevan dengan kebutuhan target penerima, khususnya para buruh dan pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Dana sebesar Rp5,6 Triliun sebaiknya dialokasikan sebagai bantuan langsung pada para buruh dan pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
- Perlu adanya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan. Selain mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan atau *moral hazard*.
- Vendor digital yang digandeng oleh pemerintah sebagai penyedia layanan digital dilakukan tanpa proses lelang *tender*. Vendor digital yang digandeng tanpa proses lelang *tender* tersebut adalah Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.
- Saat kondisi pandemik ini, masyarakat lebih membutuhkan dana tunai. Sebaiknya pemerintah lebih baik membuat program baru yang sesuai daripada memaksakan program yang ada tapi tidak sesuai dengan kondisi pandemik saat ini. Pemaksaan program akhirnya hanya membuang uang dan tidak berdampak. Program Kartu Prakerja sebenarnya adalah program yang bagus, tapi lebih tepat jika dikeluarkan bukan saat kondisi bangsa tengah menghadapi pandemi.
- Untuk bisa mengikuti pelatihan secara daring, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal di sisi lain, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.



## BAGIAN 3 Benchmark program kartu prakerja di negara lain

Pada prinsipnya Program Kartu Prakerja mirip seperti konsep Skill Development Fund untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja namun sumber pembiayaannya berasal dari APBN. Desain program Kartu Prakerja dalam penyusunannya sempat dilakukan perbandingan dengan Program SDF di Singapura yang bernama MySkillsFuture. Dari perbandingan tersebut, disimpulkan meskipun sama-sama program peningkatan keterampilan, terdapat beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan filosofi dasar masing-masing program.

Desain bisnis proses program Kartu Prakerja juga pernah dilakukan benchmarking dengan Program Hellowork di Jepang. Benchmarking ini dilakukan agar program kartu prakerja dapat berorientasi mendorong *employability* penerima, bukan hanya sekedar pelatihan.

### 3.1. Inggris

#### 3.1.1. Nama program:

Universal Credit

#### 3.1.2. Target penerima:

Target Penerima dari Universal Credit adalah penduduk Inggris yang berpenghasilan rendah ataupun pengangguran, serta memenuhi persyaratan yang berlaku untuk mendapatkan Universal Credit.

#### 3.1.3. Nilai bantuan:

Jika Penerima Program mengklaim Kredit Universal, Penerima Program akan mendapatkan satu tunjangan standar untuk rumah tangga. Jumlah yang akan Penerima Program dapatkan adalah:

- £342,72 per bulan untuk penduduk lajang di bawah 25 tahun.
- £409,89 per bulan untuk penduduk lajang berusia 25 atau lebih.
- £488,59 per bulan untuk penduduk berpasangan di bawah 25 tahun..
- £594,04 per bulan untuk penduduk berpasangan berusia 25 atau lebih.

Pembayaran Kredit Universal terdiri dari tunjangan standar. Terdapat tambahan jumlah pembayaran tunjangan apabila:

- Memiliki anak
- Memiliki kecacatan atau kondisi kesehatan yang menghambat Penerima Program untuk bekerja
- Membutuhkan bantuan membayar sewa rumah

Jika Penerima Program telah bekerja namun berpenghasilan rendah sesuai yang dipersyaratkan, jumlah Universal Credit yang diperoleh bergantung pada penghasilan. Pembayaran Universal Credit akan berkurang secara bertahap saat Penerima Program mendapatkan penghasilan. Untuk setiap £1 yang diterima, pembayaran tunjangan akan berkurang 63p. Tidak ada batasan berapa jam Pelamar dapat bekerja.

#### 3.1.4. Syarat dan kriteria seleksi

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar pelamar dapat memperoleh Universal Credit. Berikut adalah syarat tersebut:

1. Cek apakah pelamar berhak untuk mendapatkan Universal Credit atau tidak. Untuk mengecek apakah pelamar berhak, pelamar dapat mengecek kriteria yang dipublikasikan oleh Lembaga Pelaksana.
2. Membuat akun daring untuk melakukan klaim Universal Credit. Pelamar harus mengirimkan klaim pelamar dalam waktu 28 hari sejak membuat akun. Jika pelamar tinggal dengan pasangan, mereka juga perlu membuat akun. Pelamar akan diberi kode untuk menghubungkan akun bersama. Dalam pembuatan akun daring, Pelamar perlu mempersiapkan berkas sebagai berikut:
  - Detail rekening bank, *building society* atau *credit union* (hubungi saluran bantuan Universal Credit jika pelamar belum memilikinya);
  - Alamat email;
  - Informasi tentang perumahan pelamar, misalnya berapa banyak uang sewa yang Pelamar bayarkan;
  - Detail penghasilan pelamar, misalnya slip gaji;
  - Detail tabungan dan investasi apa pun, seperti saham atau properti yang pelamar sewa;
  - Detail tentang berapa banyak pelamar membayar untuk pengasuhan anak jika pelamar mengajukan bantuan untuk biaya pengasuhan anak;
  - Surat izin mengemudi;
  - Paspur;
  - Kartu debit atau kredit.

Jika pelamar tidak dapat melakukan verifikasi secara daring, tim Universal Credit akan menghubungi pelamar melalui telepon untuk membantu pelamar melakukan verifikasi identitas.

3. Pelamar mencari tahu bagaimana klaimnya dinilai. Pelamar harus melakukan wawancara dengan Jobcentre Plus. Pelamar akan diberi tahu bagaimana mengatur proses wawancara setelah mengirimkan klaim. Proses wawancara ini akan dilakukan dalam 10 hari kerja setelah mengirimkan klaim. Jika pelamar memiliki disabilitas atau kondisi kesehatan, pelamar mungkin memerlukan penilaian kemampuan kerja. Jika saat ini pelamar memiliki jadwal wawancara di Jobcentre Plus, pelamar tidak perlu pergi ke sana dikarenakan masa pandemi virus corona (COVID-19). *Department for Work and Pensions* (DWP) akan menghubungi pelamar untuk memberi tahu apa yang perlu pelamar lakukan.
4. Jika dibutuhkan, lakukan pengajuan uang muka atas pembayaran pertama. Jika pelamar memerlukan bantuan untuk membayar tagihan atau menutupi biaya lain sambil menunggu pembayaran Universal Credit pertama, pelamar dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan uang muka. Maksimum yang bisa Pelamar dapatkan di muka adalah sejumlah perkiraan pembayaran pertama Pelamar.
5. Pelamar mendapatkan pembayaran pertama. Pelamar akan mendapatkan pembayaran pertama dalam 5 minggu setelah

Pelamar melakukan klaim. Akun pelamar akan diperbarui untuk memberikan informasi berapa pembayaran yang didapatkan.

6. Pelamar melapor jika ada perubahan kondisi. Pelamar harus memperbarui akun jika keadaan pelamar berubah untuk mendapatkan pembayaran yang benar.

Secara umum, kriteria seleksi dari Penerima Universal Credit adalah sebagai berikut:

- Berpenghasilan rendah atau tidak bekerja
- Berusia 18 tahun ke atas (ada beberapa pengecualian jika Pelamar berusia 16 hingga 17 tahun)
- Di bawah usia Pensiun Negara (atau pasangan Pelamar)
- Penerima Program dan pasangan memiliki simpanan £16.000 atau kurang
- Tinggal di Inggris

Secara khusus, terdapat beberapa skenario dalam penetapan kriteria dari Penerima Universal Credit, sebagai berikut:

1. Jika Pelamar tinggal dengan pasangan.  
Pendapatan dan tabungan pasangan akan diperhitungkan, meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk Universal Credit.
2. Jika Pelamar berusia 18 tahun atau lebih dan dalam pelatihan atau belajar penuh waktu.  
Pelamar dapat membuat klaim Kredit Universal baru jika salah satu dari berikut ini berlaku:
  - ✓ Pelamar tinggal bersama pasangan Pelamar dan mereka berhak atas Universal Credit
  - ✓ Pelamar bertanggung jawab atas seorang anak, baik sebagai satu orang atau sebagai pasangan.
  - ✓ Pelamar cacat dan berhak atas *Disability Living Allowance* (DLA) atau *Personal Independence Payment* (PIP) dan memiliki kemampuan terbatas untuk bekerja.
  - ✓ Pelamar menempuh pendidikan lebih lanjut, berusia 18 tahun ke bawah dan tidak memiliki dukungan orang tua.
  - ✓ Pelamar terasing dari orang tua dan tidak berada di bawah pengawasan otoritas setempat.
3. Jika Pelamar berusia 16 atau 17 tahun.  
Pelamar dapat membuat klaim Kredit Universal baru jika salah satu dari berikut ini berlaku:
  - ✓ Pelamar memiliki kemampuan terbatas untuk bekerja atau Pelamar memiliki bukti medis dan sedang menunggu Penilaian Kemampuan Kerja.
  - ✓ Pelamar sedang merawat orang yang sangat cacat.
  - ✓ Pelamar bertanggung jawab atas seorang anak.
  - ✓ Pelamar berpasangan dengan tanggung jawab untuk setidaknya satu anak dan pasangan Pelamar berhak atas Kredit Universal
  - ✓ Pelamar hamil dengan usia kehamilan 11 minggu atau kurang sebelum minggu persalinan yang Pelamar harapkan.
  - ✓ Pelamar memiliki anak dalam 15 minggu terakhir.
  - ✓ Pelamar tidak memiliki dukungan orang tua, misalnya

Pelamar terasing dari orang tua Pelamar dan Pelamar tidak berada di bawah pengawasan otoritas setempat.

4. Jika Pelamar belajar purna waktu  
Pelamar juga dapat mengajukan klaim jika Pelamar mengikuti pendidikan lanjutan purna waktu dan salah satu dari yang berikut ini berlaku:
  - ✓ Pelamar tidak memiliki dukungan dari orang tua.
  - ✓ Pelamar memiliki kapasitas terbatas untuk bekerja dan Pelamar berhak atas Pembayaran Kemerdekaan Pribadi (PIP).
  - ✓ Pelamar bertanggung jawab atas seorang anak.
  - ✓ Pelamar adalah pasangan yang bertanggung jawab atas seorang anak dan pasangan Pelamar berhak atas Universal Credit.
5. Jika Pelamar berpasangan dan salah satu dari Pelamar adalah usia Pensiun Negara  
Pelamar dan pasangan Pelamar dapat mengklaim Credit Universal sebagai pasangan jika salah satu dari Pelamar berusia di bawah Pensiun Negara Bagian dan memenuhi syarat untuk Universal Credit. Ketika Pelamar berdua mencapai usia Pensiun Negara Bagian, klaim Universal Credit Pelamar akan berhenti. Pelamar mungkin dapat mengajukan Kredit Pensiun atau manfaat lainnya sebagai pasangan saat Universal Credit Pelamar berhenti.

3.1.5. Lembaga pelaksana:

*Department of Work and Pensions* (DWP). Departemen ini merupakan departemen layanan publik dan bertanggung jawab terhadap kebijakan kesejahteraan, pensiun, dan pemeliharaan anak.

3.1.6. Mekanisme penyaluran:

Universal Credit dibayarkan sebulan sekali, biasanya ke rekening bank, lembaga kredit, atau *credit union* penerima program. Jika penerima program tidak dapat membuka rekening bank, *building society*, atau *credit union*, penerima program dapat menghubungi saluran bantuan Universal Credit untuk mengatur cara lain menerima pembayaran.

Biasanya dibutuhkan sekitar lima minggu agar penerima program mendapatkan pembayaran pertama mereka. Penantian sebelum pembayaran pertama Pelamar terdiri dari periode penilaian satu bulan dan hingga 7 hari untuk pembayaran masuk ke akun Pelamar. Contohnya adalah sebagai berikut: Pelamar membuat klaim Kredit Universal baru pada 1 September. Periode penilaian pertama Pelamar berlangsung selama satu bulan hingga 30 September, dengan periode penilaian baru dimulai pada 1 Oktober. Pelamar dibayar pada 7 Oktober dan pada tanggal 7 setiap bulan setelahnya. Jika tanggal pembayaran Pelamar pada akhir pekan atau hari libur bank, biasanya Pelamar akan dibayar pada hari kerja sebelumnya.

3.1.7. Sistem monitoring dan evaluasi:

Terkait dengan sistem monitoring, Lembaga Pelaksana mengharuskan Penerima Program untuk membuat perjanjian yang disebut

“Komitmen Penerima Program” kepada penyedia kerja. Komitmen ini dapat berisikan beberapa hal yang berbeda sesuai dengan situasi Penerima Program, misalnya: 1) Menulis CV; 2) Mencari dan melamar pekerjaan; 3) Pergi ke kursus pelatihan. Selain ketiga hal tersebut, terdapat hal lainnya yang harus dilakukan, seperti melaporkan setiap perubahan keadaan kepada pihak yang berwenang. Jika Penerima Program melakukan klaim Universal Credit dengan pasangannya, maka Penerima Program akan memiliki Komitmen Penerima Program dan serangkaian tanggung jawab yang harus dilakukan.

Terkait dengan sistem evaluasi, Universal Credit memiliki *evaluation framework* terstruktur dengan beberapa hal yang digarisbawahi:

### 1) *Delivery and Implementation*

Komponen evaluasi ini bertujuan untuk memberikan bukti tentang proses penyampaian Universal Credit, yang mencakup berbagai tema seperti pengalaman pelanggan, staf dan pemangku kepentingan serta penggunaan dan pergeseran saluran. Itu melibatkan wawancara tatap muka dengan staf dan penggugat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan bukti secara cepat tentang peluncuran Universal Credit dan untuk menambahkan konteks ke data terkait kinerja, untuk menginformasikan pengambilan keputusan di masa depan dan untuk membantu membentuk pengembangan Universal Credit yang sedang berlangsung.

### 2) *Attitudes and behaviors*

Komponen evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana beberapa tujuan pokok Universal Credit terpenuhi dengan memeriksa bukti perubahan dalam persepsi, keyakinan dan sikap terhadap pekerjaan dan kesejahteraan. Tema utama dari komponen ini termasuk perubahan dalam perilaku pasar tenaga kerja, perubahan perilaku individu dan rumah tangga, termasuk pengambilan keputusan rumah tangga tentang berbagai bidang termasuk pekerjaan, penganggaran dan tanggung jawab perawatan. Komponen ini juga menarik bukti yang ada tentang sikap terhadap pekerjaan dan kesejahteraan, dari survei eksternal yang sudah telah lama ada, misalnya Survei Sikap Sosial Inggris dan Masyarakat Pemahaman.

### 3) *Impacts and impact measurement*

Menilai dampak pekerjaan dan manfaat dari Universal Credit adalah kunci untuk menentukan keberhasilannya secara keseluruhan. Pengukuran dampak perlu dilakukan dalam skala

waktu yang lama, terutama karena waktu yang diperlukan untuk meluncurkan program sepenuhnya dan mencapai dampak pada kondisi mapan.

#### 4) *Testing and experimentation*

Sejumlah studi skala kecil telah dilakukan atau sedang dilakukan untuk menguji elemen ketentuan kebijakan, termasuk aspek penawaran Universal Credit, menggunakan pendekatan '*test and learn*'. Pendekatan ini termasuk penelitian perilaku eksperimental yang melihat efek pesan tentang Universal Credit pada persepsi kerja dan perilaku pasar tenaga kerja di antara pelamar program tunggal, pasangan dan keluarga; penelitian kuantitatif dengan pelamar tunggal dari '*extended gateway*', serta penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan keluarga. Temuan yang muncul telah dibagikan dengan rekan kebijakan dan implementasi dan digunakan secara internal. Tujuannya adalah untuk mempublikasikan laporan ketika pekerjaan telah selesai.

#### 3.1.8. Verifikasi data:

Terkait dengan verifikasi data pada Program Universal Credit, Lembaga Pelaksana menggunakan GOV.UK Verify. Saat Penerima Program menggunakan GOV.UK Verify untuk mengakses layanan pemerintah, mereka dapat memilih dari daftar penyedia identitas (perusahaan bersertifikat) yang telah disetujui pemerintah untuk memverifikasi identitas, yaitu: Barclays, Digidentity, Experian, Post Office, atau SecureIdentity.

Biasanya diperlukan waktu antara 5 dan 15 menit untuk memverifikasi identitas saat pertama kali menggunakan Verifikasi GOV.UK. Bagi sebagian orang, mungkin butuh waktu lebih lama. Kapan pun setelah itu, hanya perlu beberapa menit untuk masuk.

Perusahaan penyedia identitas yang Penerima Program pilih untuk memverifikasi identitas akan menanyakan beberapa detail pribadi. Mereka akan memeriksa detail tersebut terhadap catatan yang disimpan oleh penyedia ponsel, agen kredit, Kantor Paspor HM atau Badan Lisensi Kendaraan dan Pengemudi (DVLA).

Perusahaan penyedia identitas kemudian dapat mengonfirmasi identitas Pelamar ke layanan pemerintah yang Pelamar gunakan (dalam kasus ini adalah Universal Credit). Kemudian, GOV.UK Verify dikatakan aman karena: 1) Informasi tidak disimpan di satu tempat; 2) Tidak ada pembagian informasi yang tidak perlu; 3) Departemen pemerintah penyedia layanan tidak mengetahui penyedia identitas mana yang Pelamar pilih; 4) Semua penyedia identitas harus memenuhi standar pemerintah dan internasional untuk keamanan dan perlindungan data.

## 3.2. Irlandia

### 3.2.1. Nama program:

COVID-19 Pandemic Unemployment Payment (PUP)

### 3.2.2. Target penerima:

Target Penerima dari Program PUP adalah karyawan dan wiraswasta yang kehilangan semua pekerjaan mereka karena darurat kesehatan masyarakat COVID-19. Untuk menerima program ini, Penerima Program harus kehilangan pekerjaan sebagai dampak pandemi COVID-19 pada atau setelah tanggal 13 Maret 2020. Permohonan baru untuk program ini tidak akan diterima setelah 17 September 2020.

### 3.2.3. Nilai bantuan:

Saat ini, bantuan Program PUP dibayar dengan 2 tarif - tergantung pada jumlah pendapatan yang biasa diterima oleh Penerima Program. Berikut adalah detail nilai bantuan Program PUP:

- Jika Penerima Program biasanya memperoleh pendapatan €200 per minggu atau lebih, maka nilai bantuan Program PUP yang didapatkan adalah € 350 per minggu
- Jika Penerima Program biasanya memperoleh pendapatan kurang dari €200 per minggu, maka nilai bantuan Program PUP yang didapatkan adalah € 203 per minggu.

Tingkat bantuan PUP akan berubah pada mulai tanggal 17 September 2020. Dari 17 September 2020 hingga 31 Januari 2021, nilai bantuan Program PUP digolongkan ke dalam 3 tarif, dengan rincian sebagai berikut:

- Jika Penerima Program biasanya memperoleh pendapatan kurang dari €200 per minggu, maka nilai bantuan Program PUP yang didapatkan adalah €203 per minggu
- Jika Penerima Program biasanya memperoleh pendapatan antara €200 dan €300 per minggu, maka nilai bantuan Program PUP yang didapatkan adalah € 250 per minggu
- Jika Penerima Program biasanya memperoleh pendapatan lebih dari €300 per minggu, maka nilai bantuan Program PUP yang didapatkan adalah €300 per minggu

### 3.2.4. Syarat dan kriteria seleksi:

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar pelamar dapat memperoleh bantuan Program PUP. Berikut adalah syarat tersebut:

- Melakukan cek eligibilitas untuk mengetahui apakah pelamar berhak mendapatkan bantuan Program PUP.
- Melakukan proses lamaran secara daring melalui situs daring mywelfare.ie. Untuk melakukan proses lamaran, pelamar perlu mempersiapkan beberapa hal berikut:
  - Akun Basic MyGovID (yang pelamar butuhkan hanyalah alamat email dan kata sandi)
  - Data pribadi pelamar
  - Rincian bank pelamar (pembayaran hanya dapat dilakukan ke rekening bank Irlandia)
- DEASP telah meminta orang-orang untuk memastikan bahwa detail penting seperti tanggal lahir, nomor PPS (*Personal Public Service*),

dan IBAN (*International Bank Account Number*) dimasukkan dengan benar karena ini dapat menunda aplikasi. IBAN memiliki 22 karakter.

- Jika Pelamar tidak dapat mendaftar secara daring, pelamar dapat mengisi formulir lamaran Program PUP COVID-19 yang disediakan di situs daring DEASP dan mengirimkan formulir tersebut melalui pos.

Kriteria seleksi dari Penerima Program PUP adalah sebagai berikut:

1. Berusia antara 18 dan 66 tahun;
2. Tinggal di Republik Irlandia;
3. Kehilangan pekerjaan Pelamar karena pandemi COVID-19;
4. Diberhentikan sementara karena pandemi COVID-19;
5. Bekerja di Republik Irlandia atau merupakan pekerja lintas perbatasan;
6. Tidak menerima pendapatan dari bekerja dan benar-benar sedang mencari pekerjaan.

Program PUP juga berlaku untuk kriteria di bawah ini:

1. Wiraswasta dan pendapatan perdagangan telah berhenti karena COVID-19;
2. Pekerja non-Uni Eropa/non-Area Ekonomi Eropa yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19;
3. Seorang siswa (non-Uni Eropa/non-Area Ekonomi Eropa) yang telah kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19;
4. Berada dalam *Direct Provision* dan telah kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19;
5. Pekerja paruh waktu.

### 3.2.5. Lembaga pelaksana:

*Department of Employment Affairs and Social Protection* (DEASP) adalah departemen pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan perlindungan sosial dan inklusi sosial di Irlandia. DEASP merancang, mengembangkan dan memberikan dukungan pendapatan, aktivasi dan layanan pekerjaan.

### 3.2.6. Mekanisme penyaluran:

Pembayaran Program PUP dibayar dengan sistem tunggakan (*paid in arrears*), dengan minggu pembayaran berjalan dari Jumat hingga Kamis.

Pembayaran dilakukan dengan transfer elektronik (ke rekening bank atau *credit union*) dan hanya ke rekening yang disimpan di lembaga keuangan Irlandia. Penerima program juga dapat memilih untuk mengambil pembayaran di kantor pos dengan membawa dokumen identitas saat mengambil pembayaran Pelamar di kantor pos.

### 3.2.7. Sistem monitoring dan evaluasi:

Sebagai upaya untuk melakukan pengawasan terhadap Program, beberapa upaya telah dilakukan, misalnya dengan membangun titik kontak dengan sesama negara anggota Uni Eropa dan memfasilitasi pelaporan anonim jika terjadi penyalahgunaan dana Program.

Di Irlandia, DEASP memiliki strategi pengawasan yang luas dan komprehensif, yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penipuan dan penyalahgunaan. Sasaran utama dari strategi pengawasan adalah untuk memastikan bahwa orang yang tepat dibayar dengan jumlah uang yang

tepat di waktu yang tepat. Jika ditemukan kecurangan, sanksi yang sesuai akan diberlakukan.

Untuk membuktikan adanya kecurangan, dibutuhkan penyelidikan kasus yang cermat dan pembentukan fakta (dilakukan wawancara secara hati-hati). Kedua hal ini mengakibatkan pelarangan pembayaran kepada pelaku kecurangan dan pemulihan dari kelebihan pembayaran sehubungan dengan periode historis (jika memungkinkan; terkadang bukti hanya memungkinkan pembayaran dihentikan dari tanggal tertentu, sehingga pemulihan penuh dari jumlah yang belum dibayar tidak mungkin).

### 3.2.8. Verifikasi data:

Lembaga Pelaksana akan melakukan peninjauan terhadap seluruh klaim dari plamar. Peninjauan ini melibatkan Komisaris Pendapatan, di mana mereka akan mengidentifikasi para pekerja yang tidak memenuhi syarat untuk memanfaatkan Pembayaran Pengangguran Pandemi Covid-19 dan akan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan pembayaran yang salah. Siapa pun yang dengan sengaja mengklaim pembayaran dalam keadaan di mana mereka tidak berhak atas pembayaran tersebut akan dituntut.

Kerja sama publik dalam memastikan bahwa hanya klaim yang benar yang diajukan sangat dihargai. Ini memastikan bahwa Lembaga Pelaksana dapat memproses klaim untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan dukungan secepat mungkin.

Selain itu di Irlandia, Kartu Layanan Umum (*Public Service Card*) disediakan agar penduduk dapat memperoleh akses layanan publik secara lebih efisien dan dengan minimal duplikasi upaya, sekaligus menjaga privasi mereka semaksimal mungkin. PSC dirancang untuk menggantikan kartu lain yang digunakan oleh DEASP seperti tiket perjalanan gratis dan kartu layanan sosial Departemen, dan untuk memudahkan penyedia layanan publik melakukan verifikasi atas identitas orang.

Menjelang akhir April 2015, total 1,34 juta kartu telah diproduksi, termasuk sedikit di bawah 700.000 PSC yang diproduksi pada tahun 2014. PSC juga memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi dan lebih baik mengenai identitas dan oleh karena itu bertindak sebagai alat utama dalam pencegahan dan deteksi penipuan identitas.

Sehubungan dengan proses pendaftaran tatap muka, PSC berupaya untuk menawarkan perlindungan terhadap penyalahgunaan. Untuk memperkuat proses pendaftaran PSC, DEASP menggunakan perangkat lunak pencocokan gambar wajah untuk membantu mendeteksi dan mencegah pendaftaran ganda. Selama proses pendaftaran, perangkat lunak melakukan pencarian foto Penerima Program yang diambil atau diimpor dengan foto yang ada di database DEASP untuk memastikan bahwa Penerima Program tersebut belum terdaftar untuk PSC menggunakan PPSN (*Personal Public Service Number*) yang berbeda, atau identitas yang berbeda. Jika ditemukan potensi kecocokan data, akan dirujuk untuk penyelidikan lebih lanjut.

### 3.3. Kanada

#### 3.3.1. Nama program:

*Canada Emergency Response Benefit (CERB)*

#### 3.3.2. Target penerima:

Target penerima dari CERB adalah warga Kanada yang bekerja dan wiraswasta yang secara langsung terpengaruh oleh COVID-19, serta memenuhi syarat yang ditentukan.

#### 3.3.3. Nilai bantuan:

PBO (*Parliament of Budget Officer*) memperkirakan biaya untuk memperpanjang durasi manfaat maksimum dari 16 menjadi 24 minggu di bawah program CERB menjadi \$ 17,9 miliar. Ini akan membuat perkiraan biaya program CERB menjadi \$71,3 miliar.

Jika Pelamar memenuhi syarat sebagai Penerima Program, Pelamar akan menerima \$2.000 untuk periode 4 minggu (sama dengan \$500 seminggu). Jika situasi Pelamar berlanjut setelah 4 minggu berlalu, Pelamar perlu mengajukan permohonan CERB kembali. Pelamar dapat mendaftar ulang hingga total 28 minggu. Ini berarti Pelamar dapat mendaftar ulang hingga 6 kali.

#### 3.3.4. Syarat dan kriteria seleksi:

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar pelamar dapat memperoleh bantuan Program CERB. Berikut adalah syarat tersebut:

1. Melakukan cek eligibilitas untuk mengetahui apakah pelamar berhak mendapatkan bantuan Program CERB.
2. Mempersiapkan informasi sebagai berikut:
  - *Social Insurance Number (SIN)*, yang berarti Pekerja Asing Sementara dan pelajar asing yang memiliki SIN dapat memenuhi syarat
  - Akun online dengan CRA atau Service Canada
3. Jika pelamar tidak dapat membuat akun online, Pelamar dapat menghubungi 1-800-959-2019.
4. Jika pelamar mengajukan CERB melalui CRA, pelamar perlu mengajukan permohonan selama 4 minggu setiap kali. Jika pelamar mengajukan permohonan melalui Service Canada, Pelamar melamar selama 2 minggu sekaligus.
5. Dalam kedua kasus, Pelamar dapat mengajukan permohonan untuk waktu pertanggungjawaban yang dimulai paling awal 15 Maret 2020, dan paling lambat 3 Oktober 2020. Dalam kedua kasus, pelamar dapat menerima pembayaran CERB maksimal 28 minggu. Waktu paling lambat yang dapat diajukan oleh siapa pun adalah pada tanggal 2 Desember 2020.

Kriteria Seleksi dari Penerima CERB adalah sebagai berikut:

1. Pelamar tidak mengajukan atau menerima manfaat CERB atau EI (*Employee Insurance*) dari Service Canada untuk periode kelayakan yang sama;
2. Pelamar tidak berhenti dari pekerjaan Pelamar secara sukarela;
3. Pelamar tinggal di Kanada dan berusia minimal 15 tahun;
4. Pelamar memperoleh minimal \$5.000 (sebelum pajak) dalam 12

bulan terakhir, atau pada tahun 2019, dari satu atau beberapa sumber berikut:

- Pendapatan pekerjaan
- Pendapatan wirausaha
- Pembayaran tunjangan provinsi terkait dengan cuti melahirkan atau cuti orang tua

Selain itu, Pelamar termasuk ke dalam kriteria Penerima CERB jika mengalami salah satu dari berikut:

1. Jam kerja Pelamar telah berkurang karena COVID-19;
2. Pelamar telah berhenti atau akan berhenti bekerja karena COVID 19;
3. Pelamar tidak dapat bekerja karena COVID-19, misalnya karena Pelamar merawat seseorang;
4. Pelamar telah dibayar EI (*Employee Insurance*) reguler setidaknya selama satu minggu manfaat sejak 29 Desember 2019 dan telah menggunakan hak atas manfaat tersebut;

Selain itu, Pelamar mengalami salah satu dari berikut.

1. Jika Pelamar melamar untuk pertama kalinya:  
Pelamar telah berhenti atau akan berhenti bekerja, atau Pelamar bekerja dengan jam kerja yang berkurang karena COVID-19, dan Pelamar tidak berharap mendapatkan lebih dari \$ 1.000 dalam pekerjaan atau pendapatan wirausaha (sebelum pemotongan) selama setidaknya 14 hari berturut-turut selama periode 4 minggu.
2. Jika Pelamar melamar untuk periode berikutnya:  
Pelamar masih belum bekerja, atau Pelamar bekerja dengan jam kerja yang berkurang karena COVID-19, dan tidak berharap mendapatkan lebih dari \$ 1.000 dalam pekerjaan atau pendapatan wirausaha (sebelum pemotongan), dan Pelamar perkiraan ini akan berlanjut selama seluruh periode 4 minggu.

### 3.3.5. Lembaga pelaksana:

#### 1. *Canada Revenue Agency (CRA)*

CRA adalah layanan pendapatan Pemerintah Kanada. CRA mengumpulkan pajak, serta mengatur hukum dan kebijakan pajak. Selain itu, CRA juga memberikan program manfaat dan kredit pajak untuk pemerintah federal dan sebagian besar pemerintah provinsi dan teritorial.

#### 2. *Service Canada*

*Service Canada* adalah lembaga yang dioperasikan oleh Departemen Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial Kanada untuk melayani akses satu titik untuk program Pemerintah Kanada, seperti Nomor Asuransi Sosial, program Asuransi Ketenagakerjaan, program Jaminan Hari Tua dan *Canada Pension Plan*. Pusat *Service Canada* juga menerima aplikasi untuk paspor Kanada.

### 3.3.6. Mekanisme penyaluran:

Pembayaran dapat dilakukan dengan pilihan dua mekanisme, yaitu: 1) Setoran langsung (transfer dana elektronik disimpan langsung ke rekening bank Pelamar); 2) Cek.

Jika Pelamar mendaftar melalui Lembaga Pelaksana, Pelamar akan dibayar \$2.000 untuk setiap periode empat minggu yang Pelamar lamar. Jika Pelamar mendaftar melalui Service Canada, Pelamar akan dibayar \$ 1.000 untuk setiap periode dua minggu yang Pelamar ajukan. Pelamar mungkin menerima pembayaran awal lebih dari \$1.000 ke akun selama minggu-minggu Pelamar berhak atas CERB sebelum Pelamar mengajukan permohonan.

#### 3.3.7. Sistem monitoring dan evaluasi:

Terkait dengan sistem monitoring dan evaluasi, CERB mengadakan pendataan statistik secara kontinu terkait total manfaat CERB yang disalurkan kepada penerima program menurut usia, jenis kelamin, dan wilayah. Dikarenakan data tidak bersifat real-time, maka terdapat kemungkinan penerima Program yang telah mendapatkan pekerjaan ataupun telah kembali bekerja sehingga tidak lagi menerima manfaat dari program CERB.

#### 3.3.8. Verifikasi data:

Proses verifikasi data pelamar dilakukan oleh Lembaga Pelaksana berdasarkan Nomor Asuransi Sosial (*Social Insurance Number / SIN*). Lembaga Pelaksana akan dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang menerima pembayaran ganda.

Lembaga Pelaksana akan memverifikasi bahwa pelamar memenuhi syarat untuk menerima manfaat. Pelamar mungkin menerima pemberitahuan dari Lembaga Pelaksana yang meminta pelamar untuk menghubungi Lembaga Pelaksana untuk memvalidasi lamaran Pelamar terhadap Program. Hal ini diperlukan untuk memverifikasi informasi dan memproses lamaran.

Jika pelamar telah menerima pembayaran dan kemudian ditemukan tidak memenuhi syarat, mereka akan dihubungi untuk membuat pengaturan untuk membayar kembali jumlah yang berlaku. Warga Kanada juga dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan CERB melalui program Leads Lembaga Pelaksana.

Lembaga Pelaksana melakukan validasi lamaran untuk menjaga kepercayaan publik pada sistem pajak Kanada dan memastikan bahwa pembayaran tersedia untuk orang yang paling membutuhkannya. Lembaga Pelaksana mungkin memerlukan beberapa informasi lebih lanjut sebelum memproses aplikasi Pelamar, seperti:

- Jika Pelamar perlu melakukan validasi lamaran
- Jika Pelamar menerima pemberitahuan yang meminta Pelamar untuk melakukan validasi aplikasi Pelamar, Pelamar harus menghubungi nomor bebas pulsa yang diberikan dalam pemberitahuan tersebut.

Lembaga Pelaksana mungkin meminta pelamar untuk menghubungi lembaga karena salah satu alasan berikut:

- Melakukan konfirmasi atas informasi pribadi
- Melakukan verifikasi atas kriteria kelayakan
- Melakukan tinjauan aktivitas akun jika terdeteksi perilaku yang mencurigakan

Sebelum pelamar menghubungi lembaga, pelamar diharapkan untuk menyiapkan informasi sebagai berikut: *Social Insurance Number (SIN)*, nama lengkap dan tanggal lahir, fotokopi dari identitas yang diterbitkan pemerintah (Paspur atau SIM), dan akses ke akun lembaga pelaksana.

Untuk melengkapi proses validasi, Lembaga Pelaksana mungkin juga meminta pelamar untuk memberikan beberapa dokumen tambahan yang sesuai dengan situasi Pelamar. Lembaga mungkin meminta dokumen-dokumen berikut seperti: slip gaji terbaru, nama dan alamat penyedia kerja, riwayat pekerjaan, pernyataan manfaat, faktur untuk layanan yang diberikan, struk pembayaran dari layanan yang diberikan, dan informasi lainnya.

Lembaga pelaksana dapat menghubungi pihak ketiga, termasuk otoritas penerbit dokumen, untuk melakukan otentikasi isi dokumen pendukung yang Pelamar berikan.

Diperlukan waktu 2 hingga 3 minggu untuk memproses berkas lemaran sejak tanggal Lembaga Pelaksana menerima tanggapan lengkap Pelamar. Lembaga akan menghubungi Pelamar setelah validasi selesai.

### 3.4. Estonia

#### 3.4.1. Nama program:

Unemployment Insurance Benefit (*Töötuskindlustushüvitis*)

#### 3.4.2. Target penerima:

Target Penerima Unemployment Insurance Benefit adalah penduduk Estonia yang pengangguran dan memenuhi syarat.

#### 3.4.3. Nilai bantuan:

Pada Bulan Maret 2020, Pemerintah Estonia menyetujui keputusan atas anggaran total €250 Juta untuk mendukung pendapatan karyawan yang tidak dapat bekerja karena efek ekonomi dari pandemi virus corona. Dana tersebut akan disalurkan melalui Dana Asuransi Pengangguran (*Töötukassa*).

Hingga 31 Juli 2020, jumlah maksimum manfaat yang dibayarkan kepada penerima program adalah 50% atau 40% dari tiga kali gaji rata-rata untuk satu hari kalender di Estonia. Untuk 100 hari pertama, maksimum €53,43 per hari dapat diterima dari 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2020 dan maksimum €42,74 per hari (jumlah kotor) dapat diterima mulai dari hari ke-101.

Mulai 1 Agustus 2020, jumlah maksimum tunjangan yang dibayarkan adalah 60% atau 40% dari tiga kali gaji rata-rata untuk satu hari kalender di Estonia; maksimum €64,12 per hari atau €198,72 untuk 31 hari dapat diterima untuk 100 hari pertama dan maksimum €42,74 per hari atau €1324,94 untuk 31 hari (jumlah kotor) dapat diterima mulai dari hari ke-101.

Jumlah minimum tunjangan asuransi pengangguran untuk satu hari kalender adalah 50% dari gaji bulanan minimum untuk tahun kalender sebelumnya dibagi 30. Jumlah minimum tunjangan asuransi pengangguran pada tahun 2020 adalah €9 untuk semua hari kalender.

#### 3.4.4. Syarat dan kriteria seleksi:

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar pelamar dapat memperoleh bantuan Unemployment Insurance Benefit. Berikut adalah syarat tersebut:

1. Melakukan cek eligibilitas untuk mengetahui apakah pelamar berhak mendapatkan bantuan Unemployment Insurance Benefit.
2. Untuk mengajukan tunjangan asuransi pengangguran, Pelamar harus mengajukan aplikasi ke Töötukassa di departemen setempat atau menggunakan layanan elektronik.
3. Jika Pelamar bekerja di Estonia, hubungan kerja atau layanan harus didaftarkan dalam daftar ketenagakerjaan oleh pemberi kerja Pelamar.
4. Töötukassa akan membuat keputusan tentang pemberian atau penolakan untuk memberikan tunjangan asuransi pengangguran dalam waktu 14 hari kalender setelah tanggal pengajuan aplikasi.
5. Keputusan akan dikirimkan kepada Pelamar melalui email atau di departemen lokal Töötukassa.
6. Setelah pemberian tunjangan asuransi pengangguran, tunjangan asuransi pengangguran akan dihitung sejak hari ke-8 setelah pengajuan aplikasi.
7. Jika hubungan kerja atau layanan terakhir Pelamar dibatalkan karena PHK dan berlangsung dari 5 hingga 10 tahun, Pelamar berhak atas tunjangan asuransi pengangguran 30 hari kalender setelah tanggal pemutusan hubungan kerja atau layanan.
8. Jika hubungan kerja atau layanan terakhir Pelamar dibatalkan karena PHK dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun, Pelamar berhak atas tunjangan asuransi pengangguran 60 hari kalender setelah tanggal pemutusan hubungan kerja atau layanan.

Kriteria seleksi dari Penerima Unemployment Insurance Benefit:

- Penerima Program terdaftar sebagai pengangguran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengangguran tidak sukarela (involuntary unemployed);
- Perusahaan sedang mengalami masalah;
- Kontrak kerja dihentikan selama masa *probation*;
- Penyedia kerja membatalkan kontrak kerja karena ketidakmampuan Calon Penerima untuk bekerja dalam jangka panjang;
- Kontrak kerja tetap telah berakhir;
- Penerima telah mengajukan lamaran untuk tunjangan asuransi pengangguran;
- Kontribusi telah dibayarkan untuk Penerima setidaknya selama 12 bulan selama 3 tahun sebelum Penerima terdaftar sebagai pengangguran;
- Penerima tidak meninggalkan tempat kerja atau layanan terakhir secara sukarela (kecuali dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam § 37 (5), § 91 (2) dan § 107 (2) dari Undang-Undang Kontrak Kerja), dengan persetujuan perusahaan Calon

Penerima (§ 79 Undang-Undang Kontrak Kerja) atau karena pelanggaran Calon Penerima sendiri (§ 88 (1) 3-8) Undang-Undang Kontrak Kerja, § 94 Undang-Undang Dinas Sipil).

3.4.5. Lembaga pelaksana:

*Estonian Unemployment Insurance Fund (Eesti Töötukassa)*

*Töötukassa* adalah organisasi kuasi-pemerintah, dan badan hukum dalam hukum publik. Lembaga ini melakukan kegiatannya secara independen dari pemerintah, tetapi atas dasar misi dan aturan operasional yang ditentukan oleh hukum. *Töötukassa* bertugas untuk mengelola ketentuan asuransi sosial yang terkait dengan pengangguran serta mengatur layanan pasar tenaga kerja yang membantu para pengangguran mendapatkan pekerjaan baru.

3.4.6. Mekanisme penyaluran:

*Töötukassa* akan membayar tunjangan asuransi pengangguran setiap bulan pada tanggal 10 bulan kalender untuk bulan kalender sebelumnya. Tunjangan asuransi pengangguran dibayarkan ke rekening bank Penerima Program atau ke rekening bank orang lain berdasarkan permohonan Penerima Program yang sesuai.

Pajak pendapatan akan dipotong dari tunjangan asuransi pengangguran. Tarif pajak penghasilan pada tahun 2020 adalah 20%. Jumlah tidak kena pajak hingga 500 EUR dalam sebulan.

Penerima berhak menerima tunjangan asuransi pengangguran selama seluruh periode ketika Calon Penerima terdaftar sebagai pengangguran, tetapi tidak lebih dari:

1. 180 hari kalender jika masa asuransi Calon Penerima lebih pendek dari 5 tahun;
2. 270 hari kalender jika masa asuransi Calon Penerima 5-10 tahun;
3. 360 hari kalender jika masa asuransi Calon Penerima 10 tahun atau lebih.

3.4.7. Sistem monitoring dan evaluasi:

Di tingkat nasional, otoritas Estonia telah mengembangkan pertukaran data yang lebih baik antara *database* yang berbeda dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga kompeten nasional lainnya. Saat terjadi kasus penyalahgunaan, pelanggar akan dikenakan pengadilan atas tindakan kriminal dan sanksi administratif. Namun, untuk dikenakan pengadilan atas tindakan kriminal, intensi dari proses penyalahgunaan harus terbukti secara eksplisit. Di Estonia, Lembaga Pelaksana dari Program berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik terutama melalui internet dan situs web yang relevan.

3.4.8. Verifikasi data:

Estonia mencatat bahwa peningkatan penggunaan pertukaran data elektronik akan memfasilitasi kerjasama yang lebih baik dan lebih efektif, sehingga meminimalkan potensi penipuan dan kesalahan. Di Estonia, data faktur yang dikirimkan secara elektronik dari penyedia layanan kesehatan secara otomatis diverifikasi (faktur elektronik harus memenuhi ukuran /

format pengiriman, yang disetujui dalam kontrak untuk pembiayaan perawatan medis antara penyedia layanan kesehatan dan EHIF).

Untuk mengajukan tunjangan asuransi pengangguran, Pelamar Program harus mengajukan aplikasi ke Lembaga Pelaksana di departemen setempat atau menggunakan layanan elektronik. Jika Pelamar Program bekerja di Estonia, hubungan kerja atau layanan harus didaftarkan dalam daftar ketenagakerjaan oleh pemberi kerja Pelamar Program.

Lembaga Pelaksana akan membuat keputusan tentang pemberian atau penolakan untuk memberikan tunjangan asuransi pengangguran dalam waktu 14 hari kalender setelah tanggal pengajuan aplikasi. Keputusan akan dikirimkan kepada Pelamar Program melalui email atau di departemen lokal Lembaga Pelaksana.

### 3.5. Finlandia

#### 3.5.1. Nama program:

Unemployment Benefit (Työttömyysturva)

#### 3.5.2. Target penerima:

Target Penerima Program Unemployment Benefit adalah penduduk Finlandia yang pengangguran, secara aktif mencari pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk menerima pekerjaan. Selain itu, terdapat syarat lainnya untuk agar penduduk dapat menjadi penerima Program.

#### 3.5.3. Nilai bantuan:

Tunjangan pengangguran yang dibayarkan oleh Kela berjumlah EUR 33,66 per hari. Manfaatnya dibayarkan selama lima hari per minggu (termasuk liburan tengah minggu). Tunjangan pengangguran bertambah jika Pelamar mengasuh anak di bawah usia 18 tahun. Jumlah tunjangan juga bertambah dengan ketentuan:

- €5,28 per hari untuk satu anak
- €7,76 per hari total untuk dua anak
- €10.00 per hari untuk tiga anak atau lebih

Selama berpartisipasi dalam layanan promosi ketenagakerjaan, tunjangan pengangguran dapat dibayar dengan tarif yang ditingkatkan hingga 200 hari. Kenaikannya adalah €4,79 per hari. Tanpa kenaikan, jumlah tunjangan pengangguran rata-rata €724 per bulan (21,5 x €33,66). Pelamar harus membayar pajak atas tunjangan pengangguran. Kemudian, penghasilan Pelamar memengaruhi jumlah tunjangan pengangguran.

#### 3.5.4. Syarat dan kriteria seleksi:

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar pelamar dapat memperoleh bantuan Unemployment Benefit. Berikut adalah syarat tersebut:

1. Melakukan cek eligibilitas untuk mengetahui apakah pelamar berhak mendapatkan bantuan Unemployment Benefit.
2. Mendaftar sebagai pencari kerja yang menganggur di TE Services. Unemployment Benefit tidak dapat dibayarkan kecuali Pelamar terdaftar sebagai pencari kerja yang menganggur.
3. Ajukan permohonan Unemployment Benefit secara daring. Masuk ke layanan elektronik menggunakan kredensial bank online Pelamar atau ID seluler. Harap diperhatikan bahwa layanan elektronik hanya

tersedia dalam bahasa Finlandia dan Swedia. Selain itu, mohon perhatikan bahwa Unemployment Benefit tidak dapat dibayarkan sebelum tanggal Pelamar terdaftar sebagai pencari kerja yang menganggur.

4. Pindai atau ambil foto dokumen pendukung dan kirimkan secara daring. Dari lamaran, Pelamar dapat memeriksa dokumen mana yang harus Pelamar lampirkan dengan lamaran tersebut.
  - Pelamar mungkin ingin menulis catatan sampul jika dokumen yang Pelamar kirim relevan dengan beberapa manfaat berbeda.
  - Dokumen yang telah Pelamar kirim ke TE Services tidak tersedia untuk Kela.
  - Kela memperoleh informasi gaji dari pendaftaran pendapatan nasional. Kela menggunakan data ini saat memproses klaim dan aplikasi. Pelamar akan dihubungi jika informasi tambahan diperlukan.
  - Jika Pelamar telah menerima royalti hak cipta, pendapatan dari wirausaha, pendapatan dividen atau sewa atau pendapatan bunga yang signifikan, Kela memerlukan dokumentasi tentang ini.
5. Kunjungi *e-service* Kela untuk melihat apakah lamaran/klaim Pelamar sudah diputuskan, berapa banyak yang akan Pelamar dapatkan dan kapan Pelamar akan dibayar. Pelamar juga dapat melihat kemungkinan pengingat tentang, misalnya, dokumen yang hilang dari aplikasi Pelamar. Keputusan tertulis tentang aplikasi Pelamar akan dikirimkan kepada Pelamar melalui pos.

Kriteria Seleksi dari Penerima Unemployment Benefit adalah sebagai berikut:

1. Berusia 17–64 tahun
2. Menganggur dan terdaftar sebagai pencari kerja di Kantor TE
3. Mencari pekerjaan penuh waktu
4. Mampu bekerja dan siap menerima pekerjaan
5. Memenuhi persyaratan untuk tunjangan harian terkait pendapatan, tunjangan pengangguran dasar atau subsidi pasar tenaga kerja.

Unemployment Benefit tidak dapat diberikan kepada pelamar yang:

1. Melakukan wajib militer atau layanan sipil alternatif
2. sedang menjalani hukuman penjara
3. Berada di rumah sakit atau perawatan institusi lainnya
4. Tidak dapat mengambil pekerjaan karena alasan lain yang sebanding.

#### 3.5.5. Lembaga pelaksana:

Kela (*Social Insurance Institution of Finland*)

Kela adalah badan pemerintah yang menyediakan keamanan ekonomi dasar bagi semua orang yang tinggal di Finlandia.

#### 3.5.6. Mekanisme penyaluran:

Manfaat pengangguran dibayarkan ke rekening bank penerima Program setiap empat minggu. Pembayaran dilakukan pada akhir setiap periode empat minggu. Jangka waktu pembayaran pertama adalah dua minggu.

Pembayaran tunjangan pengangguran didasarkan pada laporan status pengangguran. Penerima Program harus menyelesaikan laporan tersebut setiap 4 minggu, baik di *customer service online* Kela atau di formulir TT2e (laporan status pengangguran). Dalam laporan, penerima Program harus menunjukkan hari-hari apa mereka menganggur, bekerja atau, misalnya, dalam pelatihan kerja.

3.5.7. Sistem monitoring dan evaluasi:

Untuk meminimalkan kesalahan atas nama Kela, pengambilan keputusan oleh administrasi dipantau secara berkala berdasarkan evaluasi risiko. Berdasarkan hasil dari pemantauan tersebut, penanganan kasus dilatih dan proses ditingkatkan jika diperlukan.

Peningkatan kesadaran sehubungan dengan hak dan kewajiban terkait dengan koordinasi jaminan sosial telah menjadi titik fokus di Finlandia. Hal ini dicapai sebagian melalui penyebaran informasi yang relevan di situs web masing-masing dan terkait. Inisiatif peningkatan kesadaran ini selanjutnya dilengkapi dengan kampanye peningkatan kesadaran bersama - melalui saluran televisi, surat kabar, dan lainnya - di Finlandia, yang membutuhkan kerja sama antara otoritas jaminan sosial, serikat pekerja dan asuransi pensiun perusahaan

Finlandia dan Estonia menyelenggarakan kampanye bersama yang disebut "Pelamar tidak harus membayar dua kali lipat". Tujuan dari yang terakhir ini adalah untuk menginformasikan pekerja yang bergerak di antara kedua negara tentang hak dan kewajiban sosial masing-masing dengan penekanan pada undang-undang yang berlaku dan menghindari asuransi ganda.

3.5.8. Verifikasi data:

Kela menghadapi peningkatan penggunaan *data matching* di antara berbagai otoritas yang kompeten untuk mendeteksi penipuan dan kesalahan pada tahap yang jauh lebih awal. Sebagai tambahan *data matching*, *data mining* pun juga digunakan untuk mengumpulkan informasi. Selain itu, sertifikat kehidupan (*live certificate*) sering digunakan untuk memfasilitasi untuk mencegah penipuan dan kesalahan di bidang khusus koordinasi jaminan sosial

## 3.6. Kroasia

3.6.1. Nama program:

Unemployment Cash Benefit (*Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti*)

3.6.2. Target penerima:

Target Penerima dari Unemployment Cash Benefit adalah pengangguran dari sektor privat, publik, dan *self-employed* yang kehilangan pekerjaan.

3.6.3. Nilai bantuan:

Tunjangan pengangguran untuk 90 hari kalender pertama berjumlah 60% dari dasar yang ditentukan sedangkan untuk sisa waktu itu menurun menjadi 30% dari dasar. Jumlah maksimum tunjangan pengangguran selama 90 hari pertama tidak boleh lebih dari 70%, dan untuk sisa waktu tidak boleh lebih dari 35% dari gaji bersih rata-rata yang dibayarkan dalam

perekonomian Kroasia di tahun sebelumnya, menurut terbaru resmi diterbitkan data.

Gaji bersih bulanan rata-rata yang dibayarkan dalam perekonomian Kroasia pada tahun 2018 adalah HRK 6242. Jumlah minimum manfaat tidak boleh lebih rendah dari 50% dari gaji minimum (bruto) dikurangi iuran untuk asuransi pensiun wajib (HRK 1.500), kecuali dalam hal besarnya manfaat ditentukan menurut persentase waktu dihabiskan di tempat kerja. Gaji minimum tahun 2019 ditetapkan sebesar HRK 3.750 (bruto).

#### 3.6.4. Syarat dan kriteria seleksi:

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar pelamar dapat memperoleh bantuan Unemployment Cash Benefit. Berikut adalah syarat tersebut:

1. Melakukan cek eligibilitas untuk mengetahui apakah pelamar berhak mendapatkan bantuan Unemployment Cash Benefit.
2. Melakukan pendaftaran program ke CES (berdasarkan domisili tempat tinggal) melalui e-mail.
3. Saat melakukan pendaftaran, Pelamar harus melampirkan pindaian atau foto berkas dari berkas berikut:
  - Dokumen identifikasi (kartu identitas valid yang diterbitkan di Republik Kroasia, negara anggota EEA lain atau Swiss, paspor atau kartu penduduk untuk warga negara ketiga);
  - Sertifikat tempat tinggal (jika orang tersebut mendaftar di luar tempat tinggal yang tertera di kartu identitas);
  - Formulir Lamaran (dapat didownload di situs daring hzz.hr);
  - Formulir klaim kompensasi moneter;
  - Bukti alasan pemutusan hubungan kerja (misalnya keputusan pemutusan kontrak kerja, pemberitahuan pemutusan kontrak kerja waktu tetap);
  - Bukti gaji kotor rata-rata yang diperoleh dalam periode tiga bulan sebelum pemutusan hubungan kerja (misalnya sertifikat pemberi kerja, penggajian yang disertifikasi oleh pemberi kerja);
  - Salinan kartu rekening bank saat ini.
4. Jika saat ini Pelamar tidak dapat memperoleh semua dokumen yang diperlukan, permintaan Pelamar akan diterima dan akan diselesaikan setelah Lembaga Pelaksana menerima semua dokumentasi.

Kriteria Seleksi dari Penerima Unemployment Cash Benefit adalah pengangguran dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Berusia 15-65 tahun;
2. Pengangguran tidak sukarela (*involuntary unemployed*);
3. Terdaftar di CES (*Croatian Employment Service*);
4. Mendaftar program dalam waktu 30 hari setelah pemutusan hubungan kerja;
5. Mampu untuk bekerja;
6. Secara aktif mencari pekerjaan;
7. Telah bekerja setidaknya 9 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum menjadi pengangguran;
8. Melengkapi pemberkasan pada pendaftaran sebagai berikut:

- Formulir aplikasi yang telah diisi dalam daftar pengangguran.
- Mengisi formulir klaim kompensasi moneter.
- Bukti alasan pemutusan hubungan kerja (misalnya keputusan pemutusan kontrak kerja, pemberitahuan pemutusan kontrak kerja waktu tetap).
- Bukti gaji kotor rata-rata yang diperoleh dalam periode tiga bulan sebelum pemutusan hubungan kerja (misalnya sertifikat pemberi kerja, daftar gaji yang disertifikasi oleh pemberi kerja).
- Salinan kartu rekening bank saat ini.

3.6.5. Lembaga pelaksana:

*Croatian Employment Service (CES)*

CES adalah lembaga publik yang dimiliki oleh Republik Kroasia, dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Mediasi Ketenagakerjaan dan Hak Pengangguran, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan terkait pengangguran dalam arti yang luas.

3.6.6. Mekanisme penyaluran:

Dana Program Unemployment Cash Benefit disalurkan ke rekening bank Penerima program yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

3.6.7. Sistem monitoring dan evaluasi:

Tidak ada informasi terkait sistem monitoring dan evaluasi yang tersedia.

3.6.8. Verifikasi data:

Terkait dengan verifikasi data, Lembaga Pelaksana melakukan inspeksi terhadap dokumen yang dilakukan oleh pelamar. Pada situs daring hzz.hr, disebutkan jika terjadi kasus penyimpangan yang teridentifikasi, pelamar diwajibkan untuk mengembalikan dana yang tidak semestinya diterima karena akuisisi tanpa dasar.

Selain itu, Pemerintah Kroasia membuat *database* yang diperbaharui secara berkala. *Database* tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya penipuan dan kesalahan di bidang koordinasi jaminan sosial. Selain itu, *database* tersebut digunakan untuk memfasilitasi kerja sama antara otoritas Kroasia yang kompeten. Hal tersebut telah dilengkapi dengan perjanjian pertukaran data antara otoritas tersebut. Perjanjian bilateral yang mencakup berbagai topik seperti sertifikat kehidupan dan pertukaran data, juga terbukti sangat bermanfaat dalam memerangi penipuan dan kesalahan.

## 3.7. Yunani

3.7.1. Nama program:

Unemployment Benefit (Επίδομα Ανεργίας)

3.7.2. Target penerima:

Target Penerima Program Unemployed Benefit adalah pekerja berumur di atas 16 tahun yang dipecat atau yang kontrak kerjanya habis, serta memenuhi syarat lain yang ditetapkan.

3.7.3. Nilai bantuan:

Bantuan diberikan per bulan dengan nilai €360, yang meningkat 10% untuk setiap anggota keluarga.

#### 3.7.4. Syarat dan kriteria seleksi:

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar pelamar dapat memperoleh bantuan Unemployment Benefit. Berikut adalah syarat tersebut:

1. Melakukan cek eligibilitas untuk mengetahui apakah pelamar berhak mendapatkan bantuan Unemployment Benefit.
2. Memastikan bahwa Kartu Pengangguran telah diterbitkan, baik ke layanan KPA2 sesuai domisili pelamar atau layanan KPA2 dari pekerjaan terakhir.
3. Melakukan pendaftaran Program melalui salah satu dari media berikut:
  - Secara daring melalui Lembaga Pelaksana (OAED). Pelamar memilih “Pengiriman Aplikasi” → “Pendaftaran untuk Unemployment Benefit). Pelamar melakukan *login* di situs OAED secara daring dengan kode TAXISnet untuk pengguna baru.
  - Secara luring dengan mendatangi layanan KPA2 OAED.
4. Saat melakukan pendaftaran, berikut adalah berkas yang harus disiapkan oleh pelamar:
  - Formulir Pemutusan Kontrak Kerja (E6) yang ditandatangani oleh pelamar dan dicap dan ditandatangani oleh pemberi kerja atau Sertifikat Pemutusan Kontrak Kerja Tetap (E7).
  - Sertifikat kapasitas asuransi tidak langsung dari anggota keluarga yang dilindungi, jika ada (lihat di sini yang dianggap sebagai anggota yang dilindungi).
  - Data tentang wirausaha.
  - Nomor Rekening Deposito (IBAN) di mana pelamar adalah penerima pertama.
5. Pelamar diberi tahu tentang detail Program, kewajiban selama Program dan tentang tujuan pemrosesan data pribadi.
6. Pelamar menandatangani Deklarasi Bertanggung Jawab hukum 1599/86 untuk informasi yang dia terima.
7. Pelamar menerima salinan lamaran, yang menyatakan periode waktu tertentu yang harus datang ke Layanan. Periode ini ditetapkan pada bulan ketiga sejak pengajuan lamarannya.
8. Selama periode ini (bulan ketiga sejak pengajuan aplikasi), pelamar menerima keputusan untuk lamarannya, selama tidak ada masalah yang tertunda terkait dokumen pendukung.
9. Pelamar yang permohonannya tertunda atau yang telah menerima keputusan persetujuan, harus datang sendiri ke Layanan dan pada interval tertentu (setiap bulan ketiga) dan menyatakan kehadirannya. Pelamar diberi tahu secara tertulis tentang periode wajib ini oleh Layanan saat pertama kali dia tiba di sana setelah mengajukan permohonannya.
10. Keputusan persetujuan, selain periode kehadiran wajib untuk pernyataan kehadiran, harus menunjukkan durasi Unemployment Benefit dan jumlahnya.

Kriteria Seleksi dari Penerima Unemployment Benefit adalah sebagai berikut:

1. Berusia 17–64 tahun;
2. Menganggur dan terdaftar sebagai pencari kerja di Kantor TE;
3. Mencari pekerjaan penuh waktu;
4. Mampu bekerja dan siap menerima pekerjaan; dan
5. Memenuhi persyaratan untuk tunjangan harian terkait pendapatan, tunjangan pengangguran dasar atau subsidi pasar tenaga kerja.

3.7.5. Lembaga pelaksana:

Labor Employment Office (OAED)

3.7.6. Mekanisme penyaluran:

Setiap tunjangan bulanan secara otomatis dikreditkan ke rekening bank yang dideklarasikan oleh penerima, asalkan pelamar secara terus menerus hadir secara fisik untuk melapor dalam periode yang telah ditentukan di Layanan OAED, sebagaimana dirinci dalam "Keputusan untuk Mendapatkan Program" yang diterima oleh Lembaga Pelaksana.

Pemberian Unemployment Benefit dilakukan seminggu sekali dan khusus pada hari kerja terakhir yaitu setiap hari Jumat.

Jangka waktu tunjangan pengangguran yang akan diberikan tergantung pada jumlah hari kerja yang telah ditanggung oleh tertanggung asuransi dalam periode penting yang disebutkan di atas (14 bulan, 12 bulan atau 2 tahun), seperti yang disajikan di situs web Kantor Tenaga Kerja (OAED).

3.7.7. Sistem monitoring dan evaluasi:

Dalam proses monitoring dan evaluasi, inisiatif dilakukan oleh Pemerintah Yunani untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan dari dana Program. Masalah terkait penipuan dapat dilaporkan, secara anonim atau sebaliknya, ke Direktorat Polisi Keuangan, dengan menelepon 11012 atau mengirim email ke [11012@hellenicpolice.gr](mailto:11012@hellenicpolice.gr).

Dengan mengacu pada program ARIADNE (UU No4144 / 13), informasi dibagikan antara *database* semua badan jaminan sosial Yunani, di bawah tanggung jawab IDIKA A.E. (eGovernment Social Security), dan *database* TAXIS (sistem elektronik yang digunakan oleh kantor pajak – DOY), sehingga perubahan situasi individu dapat terdeteksi dalam waktu yang tepat sehingga dapat segera dihapus dari berkas badan jaminan sosial jika sesuai.

3.7.8. Verifikasi data:

Proses verifikasi data dari penerima Program dilakukan dengan Identitas TAXISnet yang digunakan oleh Pelamar saat melakukan pendaftaran. Identitas TAXISnet bersifat unik untuk setiap penduduk Yunani dan didapatkan saat melakukan pendaftaran AFM, sebuah nomor identitas pajak penduduk Yunani.

Terkait dengan sistem verifikasi data sistem TI (Ergani, Ariadne, Ilios, Atlas) menjaga kelangsungan hidup dan keberlanjutan jangka panjang dari sistem asuransi dengan membentuk Daftar Asuransi Nasional dan pemeriksaan silang data elektronik, mengurangi tenaga kerja yang tidak dilaporkan dan tidak diasuransikan, memantau pembayaran dan menghindari penyalahgunaan tunjangan.

### 3.8. Singapura

#### 3.8.1. Nama program:

MySkillsFuture

#### 3.8.2. Target penerima:

MySkillsFuture ditargetkan untuk Warga Negara Singapura dan Penduduk Permanen Singapura yang telah menyelesaikan pendidikan purna waktu (*full-time*) dan telah tergabung di angkatan kerja atau sedang mempersiapkan diri untuk bergabung di dunia kerja.

#### 3.8.3. Nilai bantuan:

Dana yang disalurkan pada Program MySkillsFuture adalah SGD500 yang diberikan satu kali untuk setiap warga Singapura berusia 25 tahun ke atas. Untuk Penduduk yang berada di rentang usia 40 - 60 tahun, mendapatkan nilai bantuan tambahan (*mid-career support*) sebesar SGD500.

*Top-up* satu kali untuk warga Singapura berusia 25 tahun ke atas pada 31 Desember 2020, akan tersedia untuk digunakan mulai 1 April 2020 di lebih dari 8.000 kursus yang ditawarkan oleh Institutes of Higher Learning dan NTUC LearningHub. Mulai 1 Oktober 2020, kredit *top-up* ini dapat digunakan untuk berbagai kursus yang memenuhi syarat Kredit SkillsFuture. Untuk mendorong warga Singapura agar mengambil tindakan tepat terkait waktu guna meningkatkan keterampilan dan keterampilan, serta lebih siap untuk memanfaatkan peluang karier baru, *top-up* ini akan berakhir pada 31 Desember 2025.

#### 3.8.4. Syarat dan kriteria seleksi:

Ada beberapa syarat yang diperlukan agar pelamar dapat memanfaatkan Program MySkillsFuture. Berikut adalah syarat tersebut:

1. Melakukan cek eligibilitas untuk mengetahui apakah pelamar berhak mendapatkan Program MySkillsFuture.
2. Memastikan bahwa pelamar memiliki informasi SingPass ID, kata sandi, nama dari *training provider*, judul kursus, dan tanggal mulai kursus.
3. Melakukan login ke akun MySkillsFuture.

Kriteria Seleksi dari Penerima Program MySkillsFuture adalah:

1. Warga Negara Singapura dan Penduduk Permanen Singapura;
2. Telah menyelesaikan pendidikan purna waktu (*full-time*);
3. Berusia 25 tahun ke atas (per tanggal 31 Desember 2020);
4. Telah tergabung di angkatan kerja atau sedang mempersiapkan diri untuk bergabung di dunia kerja.

#### 3.8.5. Lembaga pelaksana:

SkillsFuture Singapore (SSG)

SkillsFuture Singapore (SSG) adalah badan hukum di bawah Kementerian Pendidikan (MOE). Lembaga ini mendorong dan mengoordinasikan implementasi gerakan SkillsFuture nasional, mempromosikan budaya dan sistem pembelajaran sepanjang hayat yang holistik melalui penguasaan keterampilan, dan memperkuat ekosistem pendidikan dan pelatihan berkualitas di Singapura.

#### 3.8.6. Mekanisme penyaluran:

Berikut adalah mekanisme penyaluran dana pelatihan yang diberikan dalam bentuk saldo kredit SkillsFuture (SFC) hingga dapat digunakan oleh Penerima Program:

1. Penerima Program mendapatkan saldo SFC dari SSG.
2. Penerima Program mengeksplor *Training Exchange Course Directory* untuk pelatihan yang dapat menggunakan SFC. Penerima Program melakukan *login* pada situs daring MySkillsFuture untuk memperbarui profil dan mengecek saldo SFC.
3. Penerima Program mendaftar pelatihan dengan penyedia pelatihan (TP). Penerima Program menginformasikan TP terkait besaran SFC yang digunakan untuk mengimbangi (*offsetting*) biaya pelatihan yang harus dibayar.
4. Penerima Program melakukan *submit* atas klaim SFC dengan dokumen pendukung dan detail pelatihan daring yang valid dalam waktu 60 hari sebelum pelatihan dimulai melalui MySkillsFuture.
5. Penerima Program mengecek status klaim SFC melalui MySkillsFuture dan mengikuti pelatihan pada waktu yang ditentukan.
6. Penerima Program melakukan login pada MySkillsFuture untuk melihat riwayat klaim dan akun saldo SFC.

#### 3.8.7. Sistem monitoring dan evaluasi:

Terkait dengan sistem monitoring, Penyedia Pelatihan di bawah skema Kredit SkillsFuture wajib untuk diaudit secara berkala oleh SkillsFuture Singapore. SSG tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap Penyedia Pelatihan yang melanggar Syarat dan Ketentuan. Jika Penerima Program menemukan kemungkinan kasus penipuan yang melibatkan Penyedia Pelatihan, harap hubungi SSG di 6785 5785 atau melalui portal umpan balik SkillsFuture Singapore.

Terkait dengan sistem evaluasi, Lembaga Pelaksana (SSG) melakukan survei dampak untuk mengetahui seberapa efektif Program MySkillsFuture dalam peningkatan keterampilan dan kompetensi dari Penerima Program. Berdasarkan hasil survei terhadap sekitar 3.500 penduduk Singapura yang menggunakan pelatihan yang dibiayai oleh SkillsFuture, didapatkan bahwa lebih dari delapan dari 10 warga Singapura mengungkapkan bahwa pelatihan yang disediakan oleh portal MySkillsFuture membantu mereka dalam pekerjaan. Para peserta pelatihan ditanyai tentang kualitas kursus pada hari terakhir pelatihan dan disurvei lagi enam bulan kemudian tentang seberapa bermanfaatnya pelatihan tersebut bagi pekerjaan mereka.

#### 3.8.8. Verifikasi data:

Agar dapat mengakses dan melakukan transaksi pelatihan di MySkillsFuture, Penerima Program diharuskan untuk memiliki identitas SingPass yang valid. SingPass (*Singapore Personal Access*) adalah identitas yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk dapat menggunakan layanan pemerintahan, dalam hal ini MySkillsFuture. Saat menggunakan SingPass, terdapat pemanfaatan *two-step verification* (2FA) yang memastikan data terverifikasi dan valid. Dengan menggunakan 2FA, pemilik identitas akan diminta untuk memasukkan kata sandi tunggal. Kemudian, kata sandi dikirim melalui SMS, dan dapat dibuat menggunakan token

OneKey. Pemilik identitas memerlukan nama pengguna SingPass, kata sandi, dan otentikasi 2FA.

## BAGIAN 4 Perbandingan program kartu prakerja dengan benchmark negara lain

Program Kartu Prakerja memiliki perbandingan dengan program benchmark negara lain. Berikut adalah tabel yang merangkum perbandingan tersebut.

Tabel 3. Perbandingan Program Kartu Prakerja dengan Benchmark Negara Lain

Aspek Perbandingan	Pembahasan
Gambaran Umum Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kartu Prakerja ini adalah program semi-bansos, di mana bantuan akan diberikan dalam bentuk pelatihan yang tersedia di <i>platform</i> mitra, yang diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Sejauh ini, terdapat tujuh <i>platform</i> mitra dalam Program Kartu Prakerja di Indonesia, yakni: Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.</li> <li>• Bantuan dalam bentuk pelatihan ini serupa dengan Singapura, di mana Pemerintah melalui SSG memberikan bantuan berupa pelatihan secara daring melalui <i>platform</i> mitra yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi penduduk Singapura. Penduduk Singapura yang mendapatkan bantuan Program MySkillsFuture dapat mengakses sekitar 8.000 kursus yang ditawarkan oleh <i>platform</i> mitra, yakni: Institutes of Higher Learning dan NTUC LearningHub.</li> <li>• Program Kartu Prakerja memiliki perbedaan dengan negara <i>benchmark</i> lainnya. Selama masa pandemi COVID-19 ataupun pada masa normal, hampir seluruh negara yang menjadi <i>benchmark</i> menggunakan bantuan langsung (baik berupa <i>cash benefit</i> ataupun skema asuransi pengangguran) untuk membantu ataupun meringankan kondisi perekonomian dari target penerima program.</li> </ul>
Target Penerima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kartu Prakerja ditargetkan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.</li> <li>• Semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal dapat mendaftar Program Kartu Prakerja. Untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.</li> <li>• Program <i>benchmark</i> Singapura memiliki kesamaan</li> </ul>

	<p>dengan Program Kartu Prakerja, di mana target dari Program MySkillsFuture tidak terbatas pada pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, ataupun pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program MySkillsFuture dapat digunakan untuk seluruh penduduk Singapura yang berusia di atas 25 tahun dan ingin meningkatkan kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hampir seluruh negara <i>benchmark</i> memiliki perbedaan dengan Program Kartu Prakerja, di mana penerima Program di negara <i>benchmark</i> diharuskan menganggur ataupun mengalami penurunan pendapatan. Tidak seperti Program Kartu Prakerja, hampir seluruh Program di negara <i>benchmark</i> tersebut tidak memperkenankan penerimanya telah memiliki pekerjaan, memiliki sumber pendapatan, ataupun sekadar ingin mendapatkan manfaat untuk meningkatkan kompetensi. Program Kartu Prakerja hanya memprioritaskan penerima yang menganggur. Seluruh penduduk Indonesia yang sesuai dengan kriteria berhak untuk menerima Program.</li> <li>• Selain itu, beberapa negara <i>benchmark</i> lainnya juga menargetkan wirausaha yang usahanya terdampak akibat COVID-19, seperti wirausaha yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.</li> </ul>
<p>Nilai Bantuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama masa pandemi, nilai bantuan dari Program Kartu Prakerja adalah seragam untuk seluruh kategori penduduk, di mana total bantuan yang akan didapatkan oleh penerima program adalah Rp3.550.000. Rincian dari dana tersebut adalah bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif pasca pelatihan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp50.000 per survei untuk tiga kali survei. Jika pandemi sudah berakhir, maka manfaat yang akan diterima dari Program Kartu Prakerja akan kembali ke besaran Rp 650.000 per orang yang terbagi dalam Rp 500.000 dana pelatihan dan Rp 150.000 yang merupakan uang survei kebekerjaan.</li> <li>• Terdapat negara <i>benchmark</i> yang juga memiliki bantuan yang seragam untuk seluruh kategori penduduk. Di Kanada, Penerima Program CERB akan menerima \$2.000 untuk periode 4 minggu (sama dengan \$500 seminggu). Jika situasi Penerima Program CERB berlanjut setelah 4 minggu berlalu, mereka dapat mengajukan permohonan CERB kembali. Mereka dapat mendaftar ulang hingga total 28 minggu. Ini berarti mereka dapat mendaftar ulang hingga 6 kali.</li> <li>• Hampir seluruh negara <i>benchmark</i> menerapkan nilai bantuan yang berbeda disesuaikan dengan kondisi Penerima Program. Secara umum, perbedaan nilai bantuan didasarkan poin-poin kondisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbedaan usia.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kepemilikan anak</li> <li>✓ Jumlah anak yang dimiliki.</li> <li>✓ Kondisi kesehatan (apakah mengalami cacat, sakit yang menghambat untuk bekerja)</li> <li>✓ Jumlah pendapatan yang biasanya diterima sebelum menganggur</li> </ul>
<p>Syarat dan Kriteria Seleksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat untuk menerima Program Kartu Prakerja adalah pelamar harus memerhatikan apakah mereka berhak untuk mendapatkan Program Kartu Prakerja, yang dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Hal ini juga serupa dengan negara <i>benchmark</i> di mana pelamar harus mengecek eligibilitas dan melakukan pendaftaran.</li> <li>• Pendaftaran Kartu Prakerja dapat dilakukan secara daring dan luring (dengan kondisi tertentu). Hal ini serupa dengan negara <i>benchmark</i> yang pendaftarannya juga dapat dilakukan daring dan luring.</li> <li>• Pada proses pendaftaran, pelamar Program Kartu Prakerja diharuskan untuk memasukkan detail identitas, seperti: KTP, NIK, nomor KK, dan tanggal lahir sesuai yang tertera di KTP untuk keperluan verifikasi data. Hal ini juga serupa dengan negara <i>benchmark</i> yang mengharuskan pelamar untuk mencantumkan identitas yang valid. Namun dokumentasi yang diperlukan pada beberapa negara <i>benchmark</i> lebih rumit dibandingkan dengan Program Kartu Prakerja. Misalnya di Inggris, terdapat 9 dokumen yang harus dikumpulkan dalam proses pengajuan lamaran Universal Credit.</li> <li>• Kriteria seleksi dari Penerima Program Kartu Prakerja adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja/buruh yang terkena PHK;</li> <li>2. Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima buruh, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil;</li> <li>3. Warga Negara Indonesia (WNI);</li> <li>4. Berusia minimal 18 tahun;</li> <li>5. Tidak sedang menempuh pendidikan formal;</li> <li>6. Tidak berstatus sebagai pejabat negara, pemimpin dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian, kepala dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.</li> </ol> </li> <li>• Perbedaan yang signifikan dengan negara <i>benchmark</i> adalah Program Kartu Prakerja juga dapat digunakan untuk pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, di mana penerima Program Kartu Prakerja tidak harus mutlak menganggur. Pada saat pandemi ini, penerima Program memang diprioritaskan untuk pekerja/buruh yang dirumahkan,</li> </ul>

	<p>pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk di dalamnya pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, seperti pelaku usaha mikro dan kecil. Mayoritas negara <i>benchmark</i> mengharuskan penerima programnya adalah pengangguran ataupun penduduk yang mengalami penurunan pendapatan.</p>
Lembaga Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga pelaksana dari Program Kartu Prakerja adalah PMO (<i>Project Management Office</i>). PMO membantu Komite Cipta Kerja perihal pengoperasian dari Program Kartu Prakerja. PMO atau Manajemen Pelaksana (<i>Project</i> berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang akan melaksanakan operasional Kartu Prakerja.</li> <li>• Terdapat perbedaan antara Lembaga Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan program <i>benchmark</i>. Program Kartu Prakerja adalah program yang merupakan hasil koordinasi dari beberapa Lembaga Pemerintahan dan pihak lainnya di Indonesia yang tergabung dalam Komite Cipta Kerja, serta terdapat PMO (Manajemen Pelaksana) yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang membantu pengoperasian Program Kartu Prakerja. Sedangkan di negara <i>benchmark</i>, hanya terdapat 1-2 lembaga pelaksana dan secara umum berada di bawah Lembaga Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.</li> <li>• Di Kanada, terdapat dua lembaga pelaksana dari Program, yakni CRA dan Service Canada (berada di bawah Departemen Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial).</li> <li>• Di Singapura, lembaga pelaksana dari Program MyFutureSkills adalah Kementerian Pendidikan.</li> <li>• Sedangkan untuk di negara <i>benchmark</i> lainnya, Lembaga Pelaksana Program adalah satu lembaga pemerintahan yang terkait dengan Ketenagakerjaan ataupun Kesejahteraan Sosial.</li> </ul>
Mekanisme Penyaluran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme penyaluran dari dana Program Kartu Prakerja dapat dilakukan melalui mitra pembayaran sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfer rekening Bank (BNI)</li> <li>2. OVO (Jenis Premier)</li> <li>3. LinkAja</li> <li>4. Gopay</li> <li>5. DANA (per Agustus 2020)</li> </ol> </li> <li>• Secara umum, persamaan dari mekanisme penyaluran dana Program Kartu Prakerja dengan program negara <i>benchmark</i> adalah penyaluran dana melalui mekanisme transfer ke rekening bank. Namun sampai saat ini, untuk penyaluran dana Program Kartu Prakerja</li> </ul>

	<p>dengan mekanisme transfer hanya melayani ke satu jenis Bank, yakni Bank BNI yang menjadi mitra pembayaran Program Kartu Prakerja. Untuk negara <i>benchmark</i>, dana bantuan dapat ditransfer sesuai dengan jenis kartu bank yang dimiliki oleh pelamar program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal yang akan dibahas selanjutnya adalah penggunaan <i>financial technology</i> ataupun <i>e-wallet</i> sebagai media untuk menyalurkan dana Program Kartu Prakerja. Terdapat salah satu negara <i>benchmark</i> yang menggunakan <i>financial technology</i> untuk menyalurkan dana Program, yakni Singapura. Singapura menggunakan mekanisme SFC (SkillsFuture Credit) yang dapat digunakan untuk membeli pelatihan daring dalam <i>platform</i> mitra. Namun tidak seperti <i>financial technology</i> yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja, dana bantuan yang terdapat SFC tidak dapat dicairkan menjadi uang. Dana bantuan SFC hanya dapat digunakan untuk membeli pelatihan daring dalam <i>platform</i> mitra. Dana bantuan pada <i>financial technology</i> yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja dapat dicairkan menjadi uang, misalkan pada OVO jenis Premier, penerima Program dapat melakukan transfer dana bantuan ke rekening bank pribadi agar dapat dana tersebut dapat dicairkan menjadi uang.</li> <li>• Selain itu, terdapat perbedaan antara mekanisme penyaluran dana Program Kartu Prakerja dengan program negara <i>benchmark</i>. Hampir seluruh negara <i>benchmark</i> tidak menggunakan <i>financial technology</i> untuk menyalurkan dana program (hanya Singapura saja). Negara <i>benchmark</i> selain Singapura menyalurkan dana Program dengan mekanisme transfer bank, cek, ataupun <i>credit union</i> (koperasi kredit).</li> </ul>
Sistem Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan sistem monitoring terhadap penyaluran dana Program Kartu Prakerja, berdasarkan PMK No. 25 Tahun 2020, PMO diwajibkan melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran program, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.</li> <li>• Negara <i>benchmark</i> telah melakukan sistem monitoring terhadap program dengan cara yang berbeda dengan sistem monitoring Kartu Prakerja. Namun tujuan dari sistem monitoring memiliki kesamaan, yakni untuk mencegah penyalahgunaan dari dana bantuan. Di Singapura, penyedia pelatihan di bawah skema SkillsFuture Credit wajib untuk diaudit secara berkala oleh Lembaga Pelaksananya, yakni SSG. Hal ini untuk mencegah adanya penipuan oleh penyedia pelatihan. Selain itu, pengguna Program juga dapat melapor ke</li> </ul>

	<p><i>hotline</i> yang tersedia juga penyedia pelatihan terindikasi melakukan penipuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada program CERB di Kanada, dilakukan pendataan statistik secara kontinu terkait total manfaat CERB yang disalurkan kepada penerima program menurut usia, jenis kelamin, dan wilayah. Dikarenakan data tidak bersifat <i>real-time</i>, maka terdapat kemungkinan penerima Program yang telah mendapatkan pekerjaan ataupun telah kembali bekerja sehingga tidak lagi menerima manfaat dari program CERB. Proses monitoring seperti program CERB serupa dengan Program Kartu Prakerja, di mana penerima program secara kontinu didata.</li> <li>• Pada program bantuan di Finlandia, pengambil keputusan dipantau secara berkala berdasarkan evaluasi risiko. Berdasarkan hasil dari pemantauan tersebut, penanganan kasus dilatih dan proses ditingkatkan jika diperlukan.</li> <li>• Terkait dengan sistem evaluasi terhadap Program Kartu Prakerja, penerima program diharapkan untuk melakukan pengisian survei pasca pelatihan. Pengisian survei ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerima Program Kartu Prakerja sudah tepat sasaran atau belum, yakni tidak berkerja, bekerja di sektor informal, dan penghasilan rendah. Namun, hasil survei ini tidak didesain untuk evaluasi dampak.</li> <li>• Di Singapura, survei evaluasi dilakukan oleh SSG untuk mengevaluasi dampak. Terkait dengan sistem evaluasi, SSG selaku Lembaga Pelaksana Program MySkillsFuture melakukan survei dampak untuk mengetahui seberapa efektif Program MySkillsFuture dalam peningkatan keterampilan dan kompetensi dari Penerima Program. Berdasarkan hasil survei terhadap sekitar 3.500 penduduk Singapura yang menggunakan pelatihan yang dibiayai oleh SkillsFuture, didapatkan bahwa lebih dari delapan dari 10 warga Singapura mengungkapkan bahwa pelatihan yang disediakan oleh portal MySkillsFuture membantu mereka dalam pekerjaan. Para peserta pelatihan ditanyai tentang kualitas kursus pada hari terakhir pelatihan dan disurvei lagi enam bulan kemudian tentang seberapa bermanfaatnya pelatihan tersebut bagi pekerjaan mereka.</li> <li>• Terdapat negara <i>benchmark</i> telah melakukan sistem evaluasi dengan menggunakan <i>framework</i>. Di Inggris, <i>framework</i> evaluasi yang digunakan mencakup beberapa hal penting seperti: 1) <i>Delivery and Implementation</i>; 2) <i>Attitudes and behaviors</i>; 3) <i>Impacts and impact measurement</i>; 4) <i>Testing and experimentation</i>. Untuk Program Kartu Prakerja, dapat dikatakan sejauh ini hanya mengevaluasi pada poin 1 dan 2.</li> </ul>
--	---

Verifikasi Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk melakukan verifikasi data penerima program agar tidak terjadi duplikasi atau penyalahgunaan, Manajemen Pelaksana dari Program Kartu Prakerja telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk <i>filtering</i> penerima program.</li> <li>• Negara <i>benchmark</i> sudah melakukan upaya verifikasi data yang serupa dengan Program Kartu Prakerja, yakni dengan memanfaatkan nomor identitas pengguna. Di Singapura, penerima diharuskan untuk menggunakan SingPass (<i>Singapore Personal Access</i>) yang valid dan unik untuk setiap penerima Program. Begitupun di Kanada yang memanfaatkan Nomor Asuransi Sosial (<i>Social Insurance Number / SIN</i>), yang memperkenakan Lembaga Pelaksana untuk dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang menerima pembayaran ganda. Di Inggris, penerima Program juga harus melakukan verifikasi data lewat GOV.UK Verify untuk memastikan data yang diberikan bersifat valid.</li> <li>• Secara umum, beberapa negara <i>benchmark</i> lainnya melakukan verifikasi data dengan cara melakukan penyocokan data dengan <i>database</i> yang diperbaharui secara berkala.</li> <li>• Di Irlandia, Lembaga Pelaksana menggunakan perangkat lunak pencocokan gambar wajah untuk membantu mendeteksi dan mencegah pendaftaran ganda. Selama proses pendaftaran, perangkat lunak melakukan pencarian foto Penerima Program yang diambil atau diimpor dengan foto yang ada di database DEASP untuk memastikan bahwa Penerima Program tersebut belum terdaftar untuk PSC menggunakan PPSN (<i>Personal Public Service Number</i>) yang berbeda, atau identitas yang berbeda. Jika ditemukan potensi kecocokan data, akan dirujuk untuk penyelidikan lebih lanjut.</li> </ul>
-----------------	--

Sumber : Olahan Peneliti

## BAGIAN 5 Pelaksanaan dan Evaluasi Kartu Prakerja

### 5.1. Analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT) Kartu Prakerja Bagi UMKM

#### Strength Kartu Prakerja

- Bisa memberikan pelatihan yang berbasis online, terutama di saat pandemi ini
- Pelatihan ini ditawarkan dengan memberikan *voice* dan *choice*, yaitu dipilih sendiri oleh peserta melalui digital platform dan pelatihan bisa diberikan *rating*, sehingga ada mekanisme market yg bisa memperlihatkan apakah suatu pelatihan bagus ataupun tidak

#### Weakness Kartu Prakerja

- Bisa *self-declaration*, bisa jadi orang yang bukan wirausaha mengaku wirausaha
- Tuntutan penyaluran harus cepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jadi mungkin muncul faktor error dalam ketepatan sasaran, namun di minimalisir dengan SPTJM untuk membuktikan bahwa peserta memang memiliki usaha.

#### Opportunities Kartu Prakerja

- Membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Mendukung *researcher* untuk menggunakan data dari Pra-kerja untuk melakukan *impact evaluation*, meskipun biaya riset akan ditanggung oleh *researcher* sendiri.
- Kesempatan untuk membangun struktur data yang baru

#### Threats Kartu Prakerja

- Perlu membantu masyarakat memahami program baru dan melakukan sosialisasi dan edukasi
- Adanya Pro- kontra di masyarakat, banyak isu-isu negative yang muncul terkait program.

### 5.2. Database Kartu Prakerja

Terdapat beberapa data yang digunakan utamanya untuk memverifikasi dan validasi calon peserta Program Kartu Prakerja yaitu:

- a. Data Kependudukan (NIK) yang didapatkan dari Ditjan Dukcapil, Kemendagri.
- b. Data Pokok Kependidikan (Dapodik) didapatkan dari Kemendikbud.
- c. Data Perizinan Berusaha (NIB) didapatkan dari BKPM.

Terkait dengan pandemic Covid-19, program akan memberikan prioritas bagi pekerja yang terdampak, untuk itu melalui Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan pendataan dari seluruh dinas di Indonesia, termasuk juga data pekerja terPHK yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Dari rekonsiliasi data ini diperoleh data pekerja yang terdampak dan menjadi basis data untuk masa pandemic ini, yang mana apabila pekerja yang terdata tersebut mendaftar dan lolos seleksi maka akan menjadi kelompok yang diprioritaskan.

### 5.3. Sebaran Geografis Kartu Prakerja

Berdasarkan statistik pendaftar yang masuk kedalam sistem, peserta yang teregister sudah berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Adapun 5 Provinsi dengan jumlah pendaftar terbanyak berasal dari (i) Jawa Barat; (ii) Jawa Tengah; (iii) Jawa Timur; (iv) DKI Jakarta; dan (v) Sumatera Utara. Berdasarkan user yang berhasil terverifikasi dan menjadi prioritas penerima, Manajemen Pelaksana akan mendistribusikan jumlah penerima Kartu Prakerja setiap batch sesuai dengan kuota masing-masing Provinsi.

Pada evaluasi yang sudah berjalan memang masih terdapat beberapa provinsi yang *undersubscribe* (jumlah pendaftar dibawah kuota yang dialokasikan untuk provinsi tersebut). Oleh sebab itu, Manajemen Pelaksana terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk dapat memfasilitasi pendaftaran bagi masyarakatnya.

Data pendaftar dan penerima Kartu Prakerja tersimpan dalam database Manajemen Pelaksana yang dapat diakses secara terbatas. Manajemen Pelaksana akan menyediakan akses kepada pihak terkait yang membutuhkan dalam waktu segera.

### 5.4. Ketepatsasaran Penerima Kartu Prakerja

Pada pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibentuk suatu Komite yang disebut Komite Cipta Kerja. Komite ini bertugas merumuskan dan menyusun kebijakan Program sekaligus bertugas melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dimana ketua komite tersebut adalah Menko Perekonomian. Dalam penyelenggaraan program, komite dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana. Tim Pelaksana bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas komite, sedangkan Manajemen Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.

Manajemen Pelaksana dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dan dibantu oleh 5 Direktur lainnya yaitu (i) Direktur Operasi, (ii) Direktur Teknologi, (iii) Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem, (v) Direktur Pemantauan dan Evaluasi, dan (vi) Direktur Hukum, Umum dan Keuangan. Ke 6 Direktur inilah yang diberi tugas untuk melaksanakan Program Kartu Prakerja dan secara kelembagaan Manajemen Pelaksana adalah sebuah Satuan Kerja dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Tujuan awal Program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang ter-PHK, dan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kompetensi dengan syarat harus WNI, berusia minimal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti Pendidikan formal.

Akan tetapi dengan situasi pandemik Covid-19 yang kita hadapi saat ini, program ini di refocussing menjadi program semi bansos dengan target peserta adalah pekerja yang ter-PHK, pekerja yang dirumahkan, dan UKM yang mengalami penurunan pendapatan.

Sehingga untuk memastikan program ini tepat sasaran, maka Manajemen Pelaksana berkoordinasi dengan beberapa K/L yaitu (i) Kemendagri untuk integrasi data Dukcapil; (ii) Kemendikbud untuk integrasi data Dapodik dan PDDikti; (iii) sistem OSS dengan BKPM terkait data NIB; dan (iv) Kemensos untuk data DTKS. Selain itu Manajemen Pelaksana juga

berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait data Pekerja yang ter-PHK yang menjadi peserta prioritas program ini.

Manajemen Pelaksana juga menggunakan program face recognition untuk mencocokkan foto yang terekam di Dukcapil (foto KTP) dengan swafoto yang di upload calon penerima Kartu Prakerja. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pemakaian data orang lain yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan menerima manfaat dari program ini.

## 5.5. Modifikasi Pelaksanaan di masa Pandemi Covid 19

Modifikasi desain program dilakukan untuk merespon adanya wabah COVID-19 yang mengakibatkan banyak tenaga kerja terdampak. Program Kartu Prakerja yang semula tujuan utamanya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, diubah menjadi program semi-bansos yang salah satu tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Anggaran Program ditambah menjadi Rp 20 Triliun untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi tenaga kerja yang terdampak. Dengan anggaran tersebut ditargetkan Program Kartu Prakerja dapat diberikan kepada 5,6 Juta Penerima. Manfaat yang diberikan juga dilakukan penyesuaian. Semula porsi pagu anggaran sebagian besar dialokasikan untuk bantuan pelatihan bagi peserta dengan rata-rata bantuan pelatihan sebesar Rp 5 juta (dapat untuk pelatihan offline maupun online). Total insentif yang diberikan juga hanya sebesar Rp 650 ribu. Insentif tersebut lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan besaran bantuan pelatihan karena tujuan diberikannya untuk mendorong peserta menyelesaikan pelatihan dan mengganti sebagian biaya yang dikeluarkan peserta untuk mencari pekerjaan.

Adanya COVID-19 ini membuat porsi bantuan pelatihan diperkecil menjadi sebesar Rp 1 Juta dan digunakan peserta untuk mengikuti pelatihan secara online. Jumlah insentif yang diberikan ditambah menjadi sebesar Rp 2,55 Juta / peserta. Penambahan insentif tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat bertahan ditengah wabah COVID-19. Modifikasi desain program tersebut hanya berlaku sementara waktu hingga kondisi sudah kembali norma dan wabah COVID-19 tidak lagi menjadi bencana nasional nonalam.

Pada konferensi pers Bapak Presiden pada tanggal 31 Maret 2020, beliau mengamanatkan Program Kartu Prakerja menjadi salah satu instrumen jaring pengaman sosial yang digunakan pada masa pandemi. melalui amanat tersebut, tujuan akhir Program Kartu Prakerja tidak lagi hanya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat.

Kartu Prakerja sendiri digunakan sebagai instrumen bansos utamanya untuk menjaring masyarakat pada desil 40% keatas, karena pada saat pandemi muncul kelompok rentan baru akibat kehilangan pekerjaan yang mana kelompok ini tidak tercover sebagai target penerima bantuan sosial yang sudah dijalankan pemerintah selama ini.

Akan tetapi, sesuai dengan amanat Perpres 36 tahun 2020 bahwa program ini bukan untuk menggaji pengangguran melainkan stimulus bagi pekerja untuk dapat meningkatkan

kapasitas, maka komponen pelatihan tidak dapat dihilangkan dari skema Program Kartu Prakerja. Oleh sebab itu, untuk menyesuaikan dengan kondisi pada saat pandemi dilakukan refocusing Program Kartu Prakerja melalui beberapa penyesuaian skema yaitu:

1. perubahan prioritas penerima yang semula adalah pencari kerja baru dan penganggur muda menjadi pekerja ter-PHK, pekerja dirumahkan dan pekerja terdampak COVID-19;
2. pagu bantuan biaya pelatihan yang semula rata-rata Rp 5.000.000,- menjadi Rp 1.000.000,-
3. pagu insentif pasca pelatihan yang semula hanya Rp 500.000,- menjadi Rp 2.400.000 yang dibayarkan selama 4 bulan (Rp 600.000,- per bulan), dengan nominal insentif yang lebih besar diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja yang terdampak;
4. pelatihan yang semula terbuka untuk pelatihan yang bersifat online, offline, dan blended learning menjadi hanya pelatihan online akibat adanya pembatasan sosial.

Setelah pandemi usai dan kondisi kembali normal, maka skema penyaluran Program Kartu Prakerja akan disesuaikan dan dikembalikan ke skema awal.

## 5.6. Koordinasi Pelaksanaan

Program Kartu Prakerja sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan seluruh anggarannya diambil dari APBN. Akan tetapi, Program Kartu Prakerja tidak menutup kemungkinan apabila Pemda ingin terlibat dan membantu melalui skema sharing cost. Keterlibatan Pemda tersebut bukan merupakan mandatory dan hanya bersifat opsional.

Dalam Perpres 36/2020 dukungan Pemda hanya sebatas: (i) sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; (ii) penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; (iii) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan (iv) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. Dukungan lainnya seperti sharing cost dan pendampingan kepada penerima manfaat sifatnya adalah tidak diwajibkan.

Pada masa pandemic dan juga untuk membantu pekerja harian yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pendaftaran, maka melalui Kemendagri menghimbau kepada dinas terkait Pemda untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat dan ikut melakukan pendampingan peserta untuk mendaftar. Manajemen Pelaksana sudah mengeluarkan SOP terkait pendampingan tersebut bagi Pemda. Modifikasi desain program, juga dilakukan terhadap platform digital dan Lembaga pelatihan, hal ini dilakukan agar peserta mendapatkan pelatihan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar. Secara tidak langsung ini mendorong kompetisi antara lembaga pelatihan untuk berbenah dan memperbaiki kualitas Lembaga dan layanannya.

### 5.6.1. Mekanisme Penunjukan Pelaksana

Program Kartu Prakerja merupakan **bantuan langsung** yang diberikan kepada masyarakat (orang per orang) yang kemudian dapat dibelanjakan untuk pelatihan. Oleh karena tidak ada

aliran dana APBN yang masuk secara langsung kepada Platform Digital, maka kerjasama antara Manajemen Pelaksana dan Platform Digital ini tidak termasuk dalam ranah pengadaan barang dan jasa sehingga tidak ada proses lelang atau tender.

Kerjasama antara Manajemen Pelaksana dan Platform Digital adalah kemitraan yang bersifat terbuka. Pemerintah membuka kesempatan secara luas kepada seluruh platform yang ingin bergabung sebagai mitra sepanjang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Permenko No 3 tahun 2020. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi kinerja Platform Digital secara berkala dan dapat memutus kemitraan sewaktu-waktu apabila kinerjanya buruk atau ditemukan dugaan fraud.

Untuk tahap pertama memang pemerintah baru bekerjasama dengan 8 Platform Digital dan 3 mitra pembayaran. Tapi selanjutnya pemerintah terus membuka kesempatan bagi platform lainnya apabila ingin bergabung.

#### 5.6.2. Peran KPPU (Komite Pengawas Persaingan Usaha dalam Pemilihan Provider

Selain memberikan kesempatan secara luas kepada Platform Digital maupun Platform Pembayaran untuk menjadi mitra dalam penyaluran Program Kartu Prakerja sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya. Pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lembaga pelatihan untuk bergabung menjadi training provider Program Kartu Prakerja melalui mekanisme kerjasama B2B dengan Platform Digital yang sudah ditetapkan sebagai mitra resmi.

Karena proses pemilihan pelatihan diserahkan pada kompetisi pasar, peran KPPU dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja menjadi sangat penting antara lain untuk (i) memastikan pasar yang efisien tanpa ada *barrier to entry* bagi Lembaga Pelatihan, Platform Digital, maupun mitra pembayaran; (ii) memastikan persaingan usaha yang sehat antar mitra misalnya dalam penentuan fee dari Platform Digital kepada mitra lembaga pelatihan, maupun penentuan harga pelatihan oleh lembaga pelatihan agar tidak terjadi predatory pricing; serta (iii) mencegah adanya perilaku diskriminatif dalam kemitraan. KPPU akan melakukan pendampingan dalam penyusunan aturan teknis kepada Manajemen Pelaksana agar menjamin tidak adanya perilaku diskriminatif.

#### 5.6.3. Koordinasi Media

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses implementasi Program Kartu Prakerja misalnya melalui penyampaian update statistik pendaftaran dan perkembangan penyaluran program, membagi informasi syarat dan tata cara pendaftaran menjadi mitra, informasi pembukaan batch, dll.

Pemerintah juga berharap media massa dapat menjadi platform yang memberikan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan awareness dan pemahaman terhadap Program Kartu Prakerja sehingga informasi akan program ini diketahui oleh masyarakat luas.

## 5.7. *Key Performance Indicator* Kartu Prakerja

KPI Program Kartu Prakerja yang pertama adalah jumlah calon peserta yang mendaftar. Tinggi atau rendahnya jumlah pendaftar dapat menunjukkan tingkat kebutuhan masyarakat akan program ini. Indikator yang kedua adalah completion rate atau tingkat penyelesaian pelatihan. Mengingat tujuan dari Program Kartu Prakerja adalah untuk meningkatkan kompetensi, maka penyelesaian pelatihan merupakan salah satu indikator utama yang menentukan keberhasilan Program.

Indikator lainnya adalah tingkat penempatan tenaga kerja. Walaupun penempatan tenaga kerja merupakan dampak tidak langsung dari adanya Program Kartu Prakerja, menggunakan indikator penempatan kerja dinilai tetap diperlukan karena penempatan merupakan hilir dari seluruh program pelatihan.

Selain ketiga indikator tersebut, dengan adanya perubahan desain akibat COVID-19, maka indikator keberhasilan program juga perlu dilakukan penyesuaian. Penilaiannya dilakukan dengan melihat jumlah dana insentif yang disalurkan untuk menjaga daya beli pekerja dan jumlah pekerja terdampak yang menerima bantuan Program Kartu Prakerja.

### 5.7.1. *Monitoring Key Performance Indicator* Kartu Prakerja

Pihak yang memonitor program ini adalah Komite Cipta Kerja dan dibantu oleh Tim Pelaksana. Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan pelaksanaan tugas kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap 2 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan Ketua komite melaporkan kepada Presiden setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sistem pengendalian dilakukan melalui sistem pengendalian internal Pemerintah berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilakukan oleh audit internal oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program Kartu Prakerja terbuka untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari seluruh stakeholder baik masyarakat, Lembaga pelatihan, asosiasi industri dsb.

### 5.7.2. *Penanganan Keluhan dan Feedback* Kartu Prakerja

Manajemen Pelaksana memfasilitasi semua pihak yang ingin memberikan keluhan dan masukan terhadap program ini melalui call center dan media sosial instagram. Manajemen Pelaksana juga membuka komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat, Pemerintah, dan pihak lainnya untuk memberikan masukan demi perbaikan program kedepannya. Komite menyadari bahwa program ini masih baru dan perlu mendapatkan masukan dari semua pihak untuk itu dalam penyusunan struktur manajemen pelaksana dari 6 direktur terdapat direktur yang menangani komunikasi publik. Selain itu peserta penerima program juga akan

mengisi survey kebekerjaan, dimana hasil survey ini akan menjadi masukan bagi Manajemen Pelaksana untuk memperbaiki kualitas pelatihan.

### 5.7.3. Pengukuran Keberhasilan Kartu Prakerja

Tolak ukur keberhasilan program saat ini adalah (i) jumlah pendaftar, (ii) jumlah yang menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan pekerjaan baru, dan (iii) pekerja yang mendapatkan peningkatan skill, semua ini dapat dilihat dari survei kebekerjaan yang diberikan sebanyak 3 kali setelah mengikuti program (dalam jangka pendek). Dalam jangka Panjang, diharapkan program ini dapat berkontribusi meningkatkan produktivitas SDM, mengurangi angka pengangguran dan mismatch skill pekerja dengan yang dibutuhkan industri.

Semua kebijakan terkait program kartu prakerja diputuskan melalui komite cipta kerja dan juga dalam pelaksanaannya dilakukan diskusi dan kordinasi dengan K/L terkait lainnya. Dalam rangka menyempurnakan desain kebijakan Program Kartu Prakerja, dilakukan berbagai upaya diseminasi yang melibatkan berbagai kalangan. Salah satu diseminasi yang dilakukan adalah melalui “Seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan 2020” pada tanggal 18 Februari 2020. Seminar tersebut dibuat untuk mengenalkan Program Kartu Prakerja dan memaparkan detail program.

## BAGIAN 6 Rekomendasi Pelaksanaan Kartu Prakerja Bagi UMKM

Rekomendasi pelaksanaan kartu prakerja bagi UMKM adalah sebagai berikut:

- Sistem pendaftaran Bantuan Sosial lainnya, agar dapat dibuat sistem mendaftar aktif dan bukan berdasarkan data, sehingga nantinya dapat memonitoring dengan baik terkait ketepatan sasaran bantuan
- Salah satu sasaran Kartu Pra- Kerja dapat diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang harus dipulangkan dikarenakan terdampak COVID-19
- Bisa dilakukan kolaborasi antara Lembaga-lembaga terkait untuk melakukan integrasi data untuk menanggulangi kesulitan dalam pengumpulan data
- Harus ada yang bisa mengajari dan membuktikan bahwa penerima bantuan memang yang memiliki hak untuk menerima bantuan.
- Ada 3 elemen yg harus diatasi: teknis (data yang tersedia), intitusi (baik formal maupun informal), ekosistem yaitu sistem yang harus memperhatikan berkelanjutan dari program, make sure program bisa mencapai sampai ke kalangan bawah.
- Harus ada banyak skenario, tidak hanya satu plan saja, karena banyak hal yang tidak terduga yang dapat terjadi, dan untuk skenario harus terdapat balance scorecard nya masing-masing.
- Harus dijelaskan benchmark dari setiap pelaksana, untuk bisa dijadikan pegangan untuk setiap skenario yang dibuat
- Harus ada edukasi terhadap UMKM terkait pengajuan bantuan dengan baik, sehingga pada akhirnya seluruh UMKM bisa menikmati bantuan dan tidak hanya itu-itu saja
- UMKM harus lebih pro-aktif dalam mencari informasi mengenai bantuan atau program-program yang diperuntukkan bagi UMKM
- Pemerintah harus melakukan survey secara mendalam terkait apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pelaku UMKM serta apa saja hal-hal yang harus diperbaiki terkait pemenuhan kebutuhan tersebut
- Pemerintah dapat memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM, untuk cara pendampingan secara *online* maupun *offline* bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari UMKM. Salah satu jenis pendampingan yang bisa diberikan adalah pendampingan secara sectoral.
- Harus terdapat koordinasi yang baik antara dinas setempat dengan institusi terkait agar proses pengajuan bantuan tidak simpang siur dan dapat memudahkan pelaku UMKM.

## Daftar Pustaka

### Literatur

- Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Perkembangan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja*
- Jorens, Y. Gillis, D. Coninck, J.D. (2015). *Fraud and Error in The Field of Social Security Coordination*. doi: 10.2767/585086
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- Permenko No. 11 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- PMK No. 25 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

### Situs Daring

- Catriana, E. (2020). *DANA Resmi Jadi Mitra Program Kartu Prakerja*  
<https://money.kompas.com/read/2020/08/20/120000026/dana-resmi-jadi-mitra-program-kartu-prakerja>
- CNN Indonesia. (2020). *Infografis: Pro Kontra Program Kartu Prakerja*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200506091934-35-500538/infografis-pro-kontra-program-kartu-prakerja>
- Detik. (2020). *Kartu Prakerja Jokowi Dinilai Kurang Tepat untuk Hadapi Wabah Corona*.  
<https://news.detik.com/berita/d-4979059/kartu-prakerja-jokowi-dinilai-kurang-tepat-untuk-hadapi-wabah-corona>
- Idris, M. (2020). *7 Kontroversi Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi*.  
<https://money.kompas.com/read/2020/04/22/104134326/7-kontroversi-pelatihan-online-kartu-prakerja-jokowi?page=all>
- Kencana, M. R. B. (2020). *Ikut Kartu Prakerja, UMKM Akan Dibina untuk Taklukan Pasar Digital*.  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4229557/ikut-kartu-prakerja-umkm-akan-dibina-untuk-taklukan-pasar-digital>

Laoli, N. (2020). *Kartu Prakerja Dapat Mendorong Lahirnya Wirausaha Mandiri*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kartu-prakerja-dapat-mendorong-lahirnya-wirausaha-mandiri>

Olivia, G. (2020). *Kementerian Keuangan Terbitkan Aturan Teknis Anggaran Kartu Prakerja*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-keuangan-terbitkan-aturan-teknis-anggaran-kartu-prakerja?page=all>

Pernando, A. (2020). *Gelombang IV Dibuka, Ini Tuntutan Panitia*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200809/9/1276863/kartu-prakerja-gelombang-iv-dibuka-ini-tuntutan-panitia>

TMF Group. (2020). *Government support schemes for COVID-19*. <https://www.tmf-group.com/en/news-insights/coronavirus/government-support-schemes/>

<https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>

<https://www.prakerja.go.id/faq>

#### **Referensi Benchmarking Inggris**

<https://www.gov.uk/universal-credit/how-youre-paid>

<https://www.gov.uk/universal-credit/how-your-earnings-affect-your-payments>

<https://www.gov.uk/universal-credit/what-youll-get>

<https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify>

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/536193/ad-hoc-report-34-universal-credit-evaluation-framework-2016.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536193/ad-hoc-report-34-universal-credit-evaluation-framework-2016.pdf)

<https://www.gov.uk/how-to-claim-universal-credit>

#### **Referensi Benchmarking Irlandia**

<https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/>

<https://www.gov.ie/en/publication/0b0fc-covid-19-pandemic-unemployment-payment-rates-from-17-september-2020/>

[https://www.citizensinformation.ie/en/social\\_welfare/social\\_welfare\\_payments/unemployed\\_people/covid19\\_pandemic\\_unemployment\\_payment.html#d1a9a](https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/covid19_pandemic_unemployment_payment.html#d1a9a)

#### **Referensi Benchmarking Kanada**

<https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/apply-for-cerb-with-CRA.html>

<https://stepstojustice.ca/questions/covid-19/who-can-get-canada-emergency-response-benefit-cerb-and-how-do-i-apply>

[https://www.kelownanow.com/watercooler/news/news/COVID\\_19/People\\_who\\_received\\_both\\_EI\\_and\\_CERB\\_payments\\_will\\_be\\_contacted\\_shortly\\_says\\_federal\\_government/#fs\\_90186](https://www.kelownanow.com/watercooler/news/news/COVID_19/People_who_received_both_EI_and_CERB_payments_will_be_contacted_shortly_says_federal_government/#fs_90186)

<https://www.pbo-dpb.gc.ca/en/blog/legislative-costing-notes--notes-evaluation-cout-mesure-legislative/LEG-2021-032-S--canada-emergency-response-benefit-cerb-eight-week-extension--prestation-canadienne-urgence-pcu-prolongation-huit-semaines>

<https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/claims-report.html>

### **Referensi Benchmarking Estonia**

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1108&langId=en&intPageId=4510>

<https://www.tootukassa.ee/eng/content/subsidies-and-benefits/amount-unemployment-insurance-benefit>

<https://news.err.ee/1066821/government-approves-250-million-unemployment-fund-for-coronavirus-support>

<https://www.tootukassa.ee/eng/content/subsidies-and-benefits/application-and-grant-unemployment-insurance-benefit>

### **Referensi Benchmarking Finlandia**

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1109&intPageId=4528&langId=en>

<https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/work-and-enterprise/unemployment-benefit>

<https://www.kela.fi/web/en/how-to-apply>

### **Referensi Benchmarking Kroasia**

EY. (2016). Reducing the Shadow Economy through Electronic Payments. [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Reducing\\_the\\_Shadow\\_Economy\\_through\\_Electronic\\_Payments\\_Croatia/\\$FILE/REPORT\\_ShadowEconomy\\_CROATIA.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Reducing_the_Shadow_Economy_through_Electronic_Payments_Croatia/$FILE/REPORT_ShadowEconomy_CROATIA.pdf)

OECD. (2019). The OECD Tax-Benefit Model for Croatia <http://www.oecd.org/els/soc/TaxBEN-Croatia-2019.pdf>

<https://www.hzz.hr/usluge-poslodavci-posloprimci/prijava-u-evidenciju-nezaposlenih-covid19/novcana-naknada-za-nezaposlene-covid-19.php>

<https://www.hzz.hr/usluge-poslodavci-posloprimci/prijava-u-evidenciju-nezaposlenih-covid19/>

## Referensi Benchmarking Yunani

International Labour Organization. (2016). Diagnostic Report on Undeclared Work in Greece.

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/documents/projectdocumentation/wcms\\_531548.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/projectdocumentation/wcms_531548.pdf)

<https://www.angloinfo.com/how-to/greece/working/unemployment>

<https://www.a-kasser.dk/unemployment-insurance-in-europe/greece/>

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1112&langId=en&intPagelId=4571>

<http://www.oaed.gr/anergoi>

<https://www.refugee.info/greece/working-in-greece--greece/getting-a-tax-number-afm?language=en>

## Referensi Benchmarking Singapura

The New Paper. (2019). *More than 8 in 10 found SkillsFuture-funded courses helpful: Survey.*

<https://www.tnp.sg/news/business/more-8-10-found-skillsfuture-funded-courses-helpful-survey>

<https://www.skillsfuture.sg/myskillsfuture/faq>

<https://www.ssg-wsg.gov.sg/budget2020.html>

<https://www.myskillsfuture.sg/content/portal/en/header/faqs/skillsfuture-credit.html#:~:text=is%20SkillsFuture%20Credit%3F-SkillsFuture%20Credit%20aims%20to%20encourage%20individual%20ownership%20of%20skills%20development,of%20eligible%20courses%20on%20MySkillsFuture.>

[https://www.ifaq.gov.sg/ssg-wsg/apps/fcd\\_faqmain.aspx?qst=hRhkP9BzcBlmsx2TBssMsxu7lqt6UJK70a1wAEVmyfH46GgEpa%2BBR8Ea8xCW7y%2FQAQgBSRXr4UpuC1tNnS%2BMtcAq0hzpneLLKe5a2bxvENas4uL6rIUyXbuSCu0%2BJ%2FN6KZ8IAGCgzOpPPSaWsqgaRei2wG2rDDYtr%2BRm2LATDwc5ACSYhP7UKL8I2xLFWFMc%2BfcofCvPjJsduck2vD5kKoFuP37od%2BCUXx%2BzB9%2FluQ%3D#FAQ\\_2109482](https://www.ifaq.gov.sg/ssg-wsg/apps/fcd_faqmain.aspx?qst=hRhkP9BzcBlmsx2TBssMsxu7lqt6UJK70a1wAEVmyfH46GgEpa%2BBR8Ea8xCW7y%2FQAQgBSRXr4UpuC1tNnS%2BMtcAq0hzpneLLKe5a2bxvENas4uL6rIUyXbuSCu0%2BJ%2FN6KZ8IAGCgzOpPPSaWsqgaRei2wG2rDDYtr%2BRm2LATDwc5ACSYhP7UKL8I2xLFWFMc%2BfcofCvPjJsduck2vD5kKoFuP37od%2BCUXx%2BzB9%2FluQ%3D#FAQ_2109482)

<https://www.myskillsfuture.sg/content/portal/en/header/faqs/skillsfuture-credit.html>

<https://www.wealthbridgecs.com/faqs/what-is-a-singpass>

- **Dokumentasi**